



RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN TOBA

2025– 2029



Jl. Pematang Siantar
Gedung B,
Desa Sibolanghotang Sas
Kec. Balige, Kab. Toba. 22312



loka_toba@pom.go.id



081370142744

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TOBA

NOMOR HK.02.02.3C.12.25.68 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba Tahun

2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Toba.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toba
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kabupaten Toba



TUMIUR GULTOM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR.....	III
BAB I	- 1 -
PENDAHULUAN	- 1 -
1.1. KONDISI UMUM.....	- 1 -
1.1.1. <i>Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2020 – 2024</i>	- 4 -
1.1.2. <i>Aspirasi Stakeholder</i>	- 36 -
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	- 38 -
1.2.1. <i>Kekuatan (Strength)</i>	- 38 -
1.2.2. <i>Kelemahan (Weakness)</i>	- 45 -
1.2.3. <i>Peluang (Opportunity)</i>	- 48 -
1.2.4. <i>Ancaman (Threat)</i>	- 50 -
BAB II	- 55 -
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	- 55 -
2.1. VISI.....	- 55 -
2.2. MISI	- 56 -
2.3. TUJUAN	- 58 -
2.4. SASARAN KEGIATAN	- 60 -
BAB III	- 74 -
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	- 74 -
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	- 74 -
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN TOBA	- 77 -
BAB IV	- 84 -
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	- 84 -
4.1. TARGET KINERJA.....	- 84 -
4.2. KERANGKA PENDANAAN	- 88 -
BAB V	- 89 -
PENUTUP	- 89 -
LAMPIRAN.....	- 90 -
<i>Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029</i>	<i>- 90 -</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024.....	- 4 -
Tabel 2 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Toba Per jabatan fungsional	- 42 -
Tabel 3 Kebutuhan dan pemenuhan SDM tahun 2025	- 45 -
Tabel 4 Keterjangkauan Pengawasan.....	- 54 -
Tabel 5 Matriks Ringkasan Analisis SWOT.....	- 54 -
Tabel 6 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	- 59 -
Tabel 7 Penjabaran tujuan, sasaran strategis dan sasaran kegiatan	- 64 -
Tabel 8 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	- 68 -
Tabel 9 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi loka pom di kabupaten toba 2025-2029	- 82 -
Tabel 10 Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba 2025-2029	- 84 -
Tabel 11 Kerangka Pendanaan Periode 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan.....	- 88 -
Tabel 12 Kerangka Pendanaan periode 2025-2029 Berdasarkan Sumber Pendanaan.....	- 88 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	- 2 -
Gambar 2 Pembagian wilayah kerja Loka Tahun 2025	- 3 -
Gambar 3 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024.....	- 7 -
Gambar 4 Grafik Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024.....	- 8 -
Gambar 5 Grafik Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024.....	- 10 -
Gambar 6 Grafik Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	- 11 -
Gambar 7 Grafik Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024	- 12 -
Gambar 8 Grafik Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023-2024	- 13 -
Gambar 9 Grafik Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020-2024.....	- 14 -
Gambar 10 Grafik Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020-2024	- 15 -
Gambar 11 Grafik Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024	- 17 -
Gambar 12 Grafik Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024	- 18 -
Gambar 13 Grafik Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024	- 19 -
Gambar 14 Grafik Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022-2024	- 20 -
Gambar 15 Grafik Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024	- 21 -
Gambar 16 Grafik Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020-2024	- 23 -
Gambar 17 Grafik Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	- 24 -
Gambar 18 Grafik Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	- 25 -
Gambar 19 Grafik Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan makanan...	- 26 -
Gambar 20 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	- 28 -
Gambar 21 Grafik Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan makanan...	- 29 -
Gambar 22 Grafik Nilai AKIP	- 29 -
Gambar 23 Grafik Nilai Pengelolaan Kearsipan.....	- 30 -
Gambar 24 Grafik Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.....	- 31 -
Gambar 25 Grafik Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	- 32 -
Gambar 26 Grafik Indeks Profesionalitas ASN	- 33 -
Gambar 27 Grafik Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	- 34 -
Gambar 28 Grafik Nilai Kinerja Anggaran.....	- 35 -
Gambar 29 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat	- 37 -
Gambar 30 IPP Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM tahun 2024 dan 2025.....	- 39 -
Gambar 31 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional Loka POM di Kabupaten Toba .	- 41 -
Gambar 32 Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Toba berdasarkan tipe pegawai.....	- 41 -
Gambar 33 Capaian jumlah alumni pelatihan dari tahun 2020 sampai 2024.....	- 43 -
Gambar 34 Komposisi pegawai Loka POM di Kabupaten Toba	- 43 -
Gambar 35 Akumulasi Pendampingan UMKM hingga memperoleh sertifikat dari 1 Januari 2024 sampai 30 Oktober 2025	- 49 -

Gambar 36 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Toba..... - 53 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Loka POM di Kabupaten Toba memiliki cakupan wilayah kerja di 9 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Toba sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba, yaitu:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Toba disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Toba terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba pada tahun 2025 juga ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023. Cakupan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Toba sebagai berikut :



Gambar 2 Pembagian wilayah kerja Loka Tahun 2025

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Dalam rangka mendukung BPOM untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik, Loka POM di Kabupaten Toba sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Toba berpedoman pada Renstra BPOM periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024, maka capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Toba sebagai berikut:

TABEL 1 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKA POM DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2020-2024

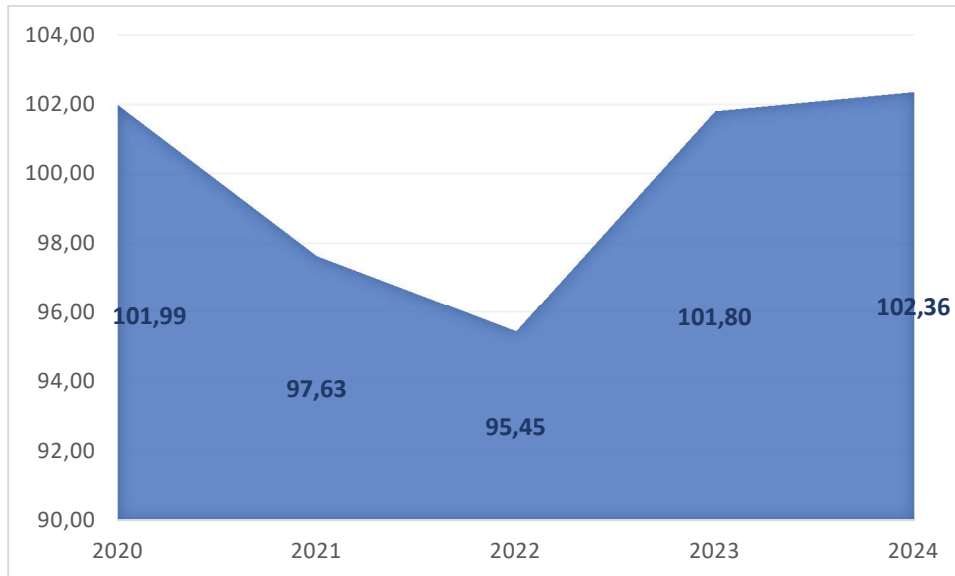
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba															
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	82,53	102,14%	83,60	80,23	95,97%	85,60	83,80	97,90%	87,60	98,81	112,80%	98,90	98,46	99,56%
Persentase makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	77,08	98,82%	80,00	85,71	107,14%	82,00	88,89	108,40%	84,00	87,72	104,43%	89,00	91,94	103,30%
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	81,40	92,49%	88,00	87,88	99,86%	89,00	94,68	106,38%	90,00	96,88	107,64%	96,90	97,42	100,54%
Persentase makanan yang aman dan bermutu erdasarkan hasil pengawasan	60,00	73,68	122,81%	74,00	68,97	93,20%	76,00	72,00	94,74%	77,00	92,31	119,88%	88,50	90,28	102,01%
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat										89,00	100,00	112,36%	92,00	95,12	103,39%
SK 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba															
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00	81,16	95,48%	85,00	100,00	117,65%	86,00	100,00	116,28%	87,00	100,00	114,94%	100,00	100,00	100,00%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	38,50	39,29	102,04%	48,00	65,87	137,23%	57,00	55,56	97,47%	66,00	67,86	102,82%	75,00	78,81	105,08%
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	50,00	58,82%	85,00	100,00	117,65%	86,70	100,00	115,34%	88,30	100,00	113,25%	100,00	100,00	100,00%
Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	28,57	39,68%	72,00	78,57	109,13%	73,00	78,95	108,15%	74,00	83,33	112,61%	83,40	76,47	91,69%
Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	45,45	64,94%	71,00	93,86	132,20%	72,00	88,19	122,49%	73,00	74,26	101,73%	75,00	77,55	103,40%

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77,00	50,00	64,94%	79,00	66,67	84,39%	81,00	100,00	123,46%
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	96,22	101,28%
SK 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba															
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,00	93,83	105,43%	94,00	90,57	96,35%	94,90	92,07	97,02%	95,90	95,92	100,02%	96,80	96,93	100,13%
SK 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%
SK 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan makanan	60,00	85,00	141,67%	85,00	43,33	50,98%	86,00	21,25	24,71%	88,00	15,00	17,05%	70,00	66,25	94,64%
SK 6: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT													88,00	88,52	100,59%
SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal															
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
Nilai AKIP										82,20	73,22	89,07%	74,29	74,94	100,87%

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Nilai Pengelolaan Kearsipan													63,71	68,31	107,22%
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%									
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%						
SK 8: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal															
Indeks Profesionalitas ASN	75,00	83,28	111,04%	83,50	85,83	102,79%	84,00	84,88	101,05%	84,50	89,50	105,92%	90,31	85,88	95,09%
SK 9: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal															
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi							2,25	3,00	133,33%	2,50	3,00	120,00%	3,00	3,00	100,00%
SK 10: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran							90,60	89,27	98,53%	91,80	89,52	97,52%	90,49	91,72	101,36%
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													70,00	90,00	128,57%
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													79,00	92,14	116,63%
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60,00	95,04	158,40%
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	93,50	75,00	80,21%	93,50	100,00	106,95%									

(Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

Selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Toba periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Loka POM di Kabupaten Toba selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



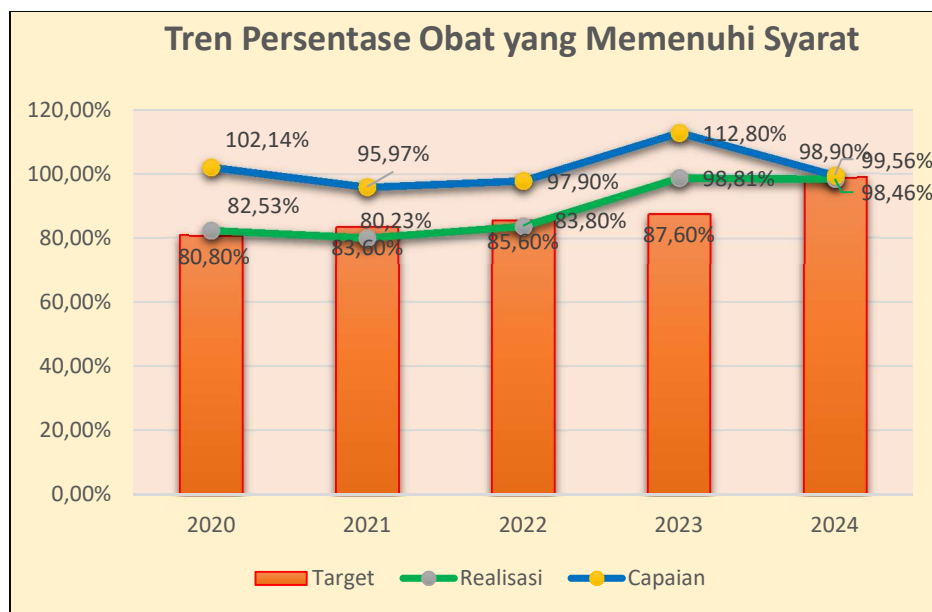
Gambar 3 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Toba mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Loka POM di Kabupaten Toba menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Loka POM di Kabupaten Toba memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada

sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan adalah: Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-dua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.



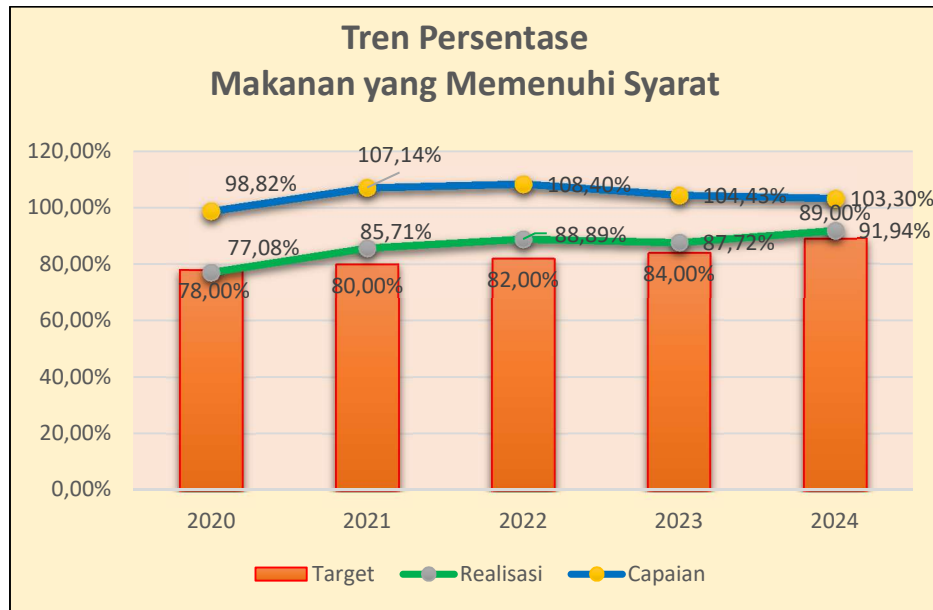
Gambar 4 Grafik Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Indikator Persentase Obat yang memenuhi Syarat pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Kenaikan terjadi pada tahun 2020, 2022, 2023 dan penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Kenaikan pada tahun 2020 dengan realisasi 82,53% dan capaiannya 102,14% dari targetnya 80,80%.

- Kenaikan sebesar 1,93% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 83,80% dan capaiannya 97,90% dari targetnya 85,60%.
- Kenaikan sebesar 14,9% terjadi pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 98,81% dan capaiannya 112,80% dari targetnya 87,60%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,17%, dengan realisasi sebesar 80,23% dan capaiannya 95,97% dari targetnya 83,60%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 senilai 0,35%, dengan realisasi sebesar 98,46% dan capaiannya 99,56%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 11,3% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 87,60% dan pada tahun 2024 target mencapai 98.90%.

Secara keseluruhan, tren Persentase Obat yang memenuhi Syarat pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan pada tren ini didukung oleh pelaporan berkala seluruh hasil uji sampel obat MS dan TMS ke Pusat melalui SIPT, disertai koordinasi intens dengan Pusat untuk tindak lanjut melalui surat ke industri terkait. Kemudian pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi serta distribusi dilakukan secara rutin untuk memastikan penjaminan mutu obat dan makanan. Selain itu, koordinasi yang baik antara tim pemeriksaan dan Balai Penguji dilakukan dalam perencanaan sampling dan pengujian serta dievaluasi secara berkala. Namun terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2024 dikarenakan masih ditemukannya sampel TMS pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan) dan TMS hasil pengujian. Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan Loka POM di Kabupaten Toba dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi.

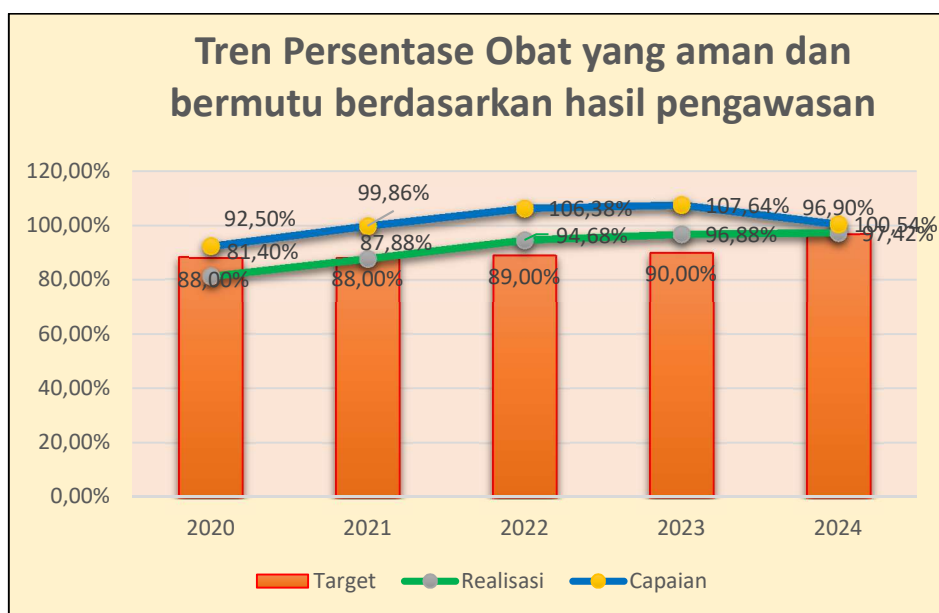


Gambar 5 Grafik Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Indikator Persentase Makanan yang memenuhi Syarat pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan realisasi dan capaian pada tahun 2020-2022. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2023 & tahun 2024. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 77,08% dan capaiannya 98,82% dari targetnya 78,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 8,32% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 85,71% dan capaiannya 107,14% dari targetnya 80,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 1,26% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 88,89% dan capaiannya 108,40% dari targetnya 82,00%.
- Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,97%, dengan realisasi sebesar 87,72% dan capaiannya 104,43% dari targetnya 84,00%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 senilai 1,13%, dengan realisasi sebesar 91,94% dan capaiannya 103,30%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 5% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 84,00% dan pada tahun 2024 target mencapai 89,00%.

Secara keseluruhan, tren indikator Persentase Obat yang memenuhi Syarat pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja pada indikator ini didukung oleh pelaksanaan koordinasi secara rutin antara tim Pemeriksaan dan Balai Penguji terkait perencanaan sampling, penyusunan target sampling, dan pengujian berdasarkan pedoman sampling.



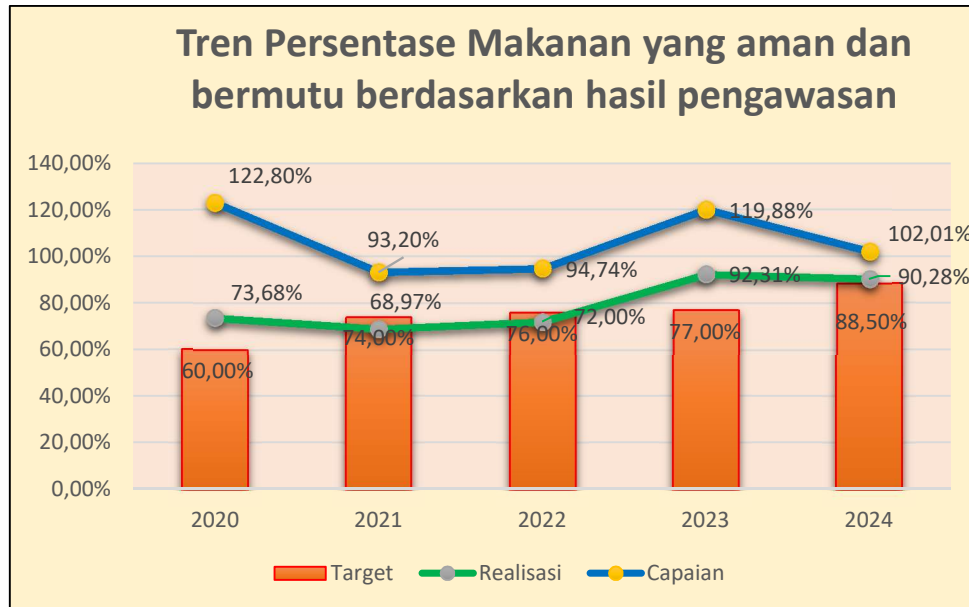
Gambar 6 Grafik Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan realisasi dan capaian pada tahun 2020-2023. Sedangkan penurunan hanya terjadi pada tahun 2024. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 81,40% dan capaiannya 92,50% dari targetnya 88,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 7,36% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 87,88% dan capaiannya 99,86% dari targetnya 88,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 6,52% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 87,88% dan capaiannya 99,86% dari targetnya 88,00%.
- Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2023 sebesar 1,26%, dengan realisasi sebesar 96,88% dan capaiannya 107,64% dari targetnya 90,00%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 senilai 7,1%, dengan realisasi sebesar 97,42% dan capaiannya 100,54%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 6,90% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 90,00% dan pada tahun 2024 target mencapai 96,90%.

Secara keseluruhan, tren pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan terus berupaya menjaga koordinasi rutin antara Pemeriksaan dan Balai Penguji terkait

perencanaan, penetapan target sampling, dan pelaksanaan pengujian sesuai pedoman. Selain itu, pembinaan sarana produksi dan distribusi dilakukan secara konsisten untuk memastikan penjaminan mutu produk obat dan makanan. Upaya peningkatan pelaksanaan sampling sesuai perencanaan dan pedoman terus dilakukan, disertai monitoring terhadap hasil uji sampel.



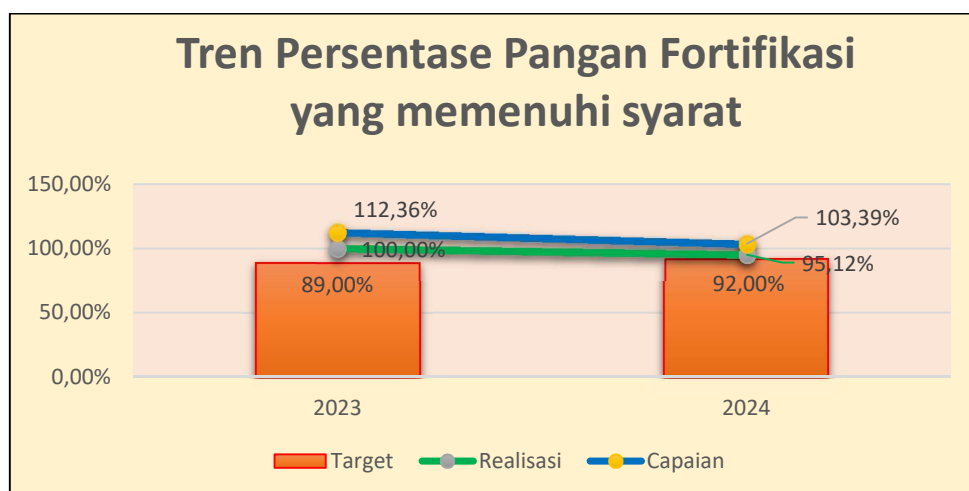
Gambar 7 Grafik Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024

Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Kenaikan realisasi dan capaian pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2021 & 2024. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 73,68% dan capaiannya 122,80% dari targetnya 60,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 1,54% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 72,00% dan capaiannya 94,74% dari targetnya 76,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 25,14% terjadi pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,31% dan capaiannya 119,88% dari targetnya 77,00%.
- Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2021 sebesar 29,6%, dengan realisasi sebesar 68,97% dan capaiannya 93,20% dari targetnya 74,00%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 sebesar 17,87%, dengan realisasi sebesar 90,28% dan capaiannya 102,01%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 11,50%

jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 77,00% dan pada tahun 2024 target mencapai 88,50%.

Secara keseluruhan tren indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Penunjang keberhasilan kinerja ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim Pemeriksaan dan Balai Penguji terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian serta evaluasi pelaksanaan sampling secara rutin. Namun, terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2024 dikarenakan masih ditemukannya sampel TMS pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan) dan TMS hasil pengujian. Kondisi ini terjadi karena masih kurangnya komitmen pelaku usaha makanan untuk melaksanakan produksi sesuai CPPB sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi.



Gambar 8 Grafik Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023-2024

Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023-2024 merupakan indikator yang baru ada di tahun 2023. Sehingga Perbandingan realisasi & capaian hanya dapat dibandingkan di 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 & tahun 2024. Terdapat kenaikan target dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun pertama di tahun 2023, realisasi sebesar 100% dengan capaiannya mencapai 112,36% dari targetnya 89,00%.
- Pada tahun 2024, realisasi sebesar 95,12% dengan capaiannya 103,39% dari targetnya 103,39%.

Secara keseluruhan, tren indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Keberhasilan indikator ini didukung oleh peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling dan

penilaian penandaan label komoditi pangan fortifikasi dilakukan sejalan dengan peningkatan koordinasi bersama balai penguji regional untuk pengujian dan penetapan hasil uji. Terdapat penurunan realisasi sebesar 4,88% dari tahun 2023 ke 2024 karena masih ditemukan dua sampel pangan fortifikasi (produk garam) dengan hasil uji TMS. Atas temuan tersebut, telah dilakukan tindak lanjut melalui penyampaian surat kepada UPT terkait di lokasi produksi garam tersebut.

Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Selain itu, diperlukan peran pelaku usaha untuk wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

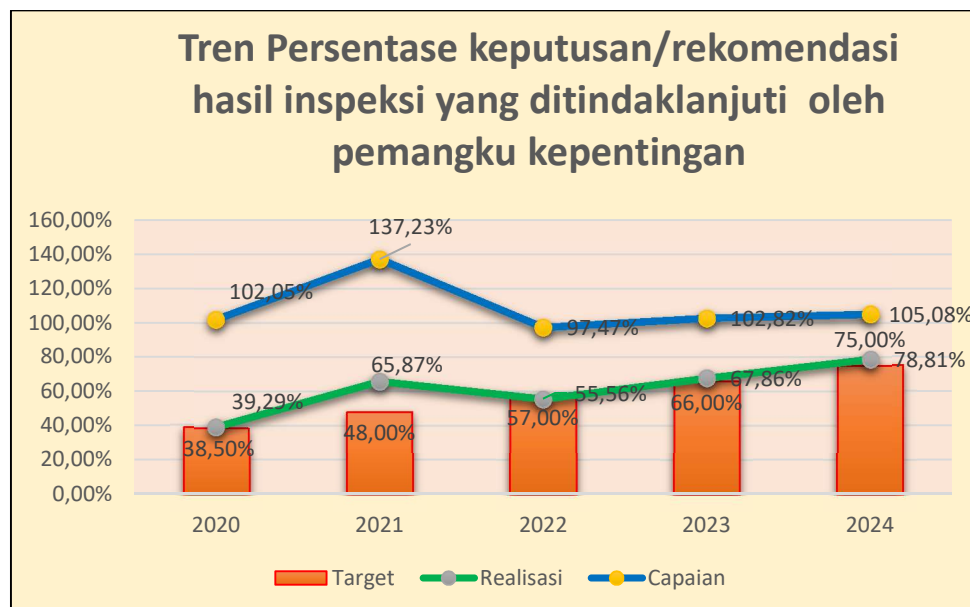


Gambar 9 Grafik Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020-2024

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Kenaikan realisasi dan capaian pada tahun 2020 & 2021. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2022-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 81,16% dan capaiannya 95,48% dari targetnya 85,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 22,17% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 100,00% dan capaiannya 117,65% dari targetnya 85,00%.
- Penurunan realisasi sebesar 1,37% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 116,28% dari targetnya 86,00%.
- Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2023 senilai 1,34%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 114,94% dari targetnya 87,00%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 sebesar 14,94%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 13% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 87% dan pada tahun 2024 target mencapai 100%.

Tren realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 meningkat karena Loka POM di Kabupaten Toba melakukan monitoring hasil pemeriksaan dan penerbitan tindak lanjut agar seluruh sarana yang memerlukan tindak lanjut tidak ada yang terlewat, disertai pengingat kepada petugas untuk segera menyusun laporan dan surat tindak lanjut. Surat tindak lanjut diterbitkan bagi sarana TMS melalui edukasi dan pembinaan. Kemudian melakukan monitoring dan *follow-up* hasil pemeriksaan dilakukan secara lebih intens dan rutin setiap bulan agar sesuai *timeline*.

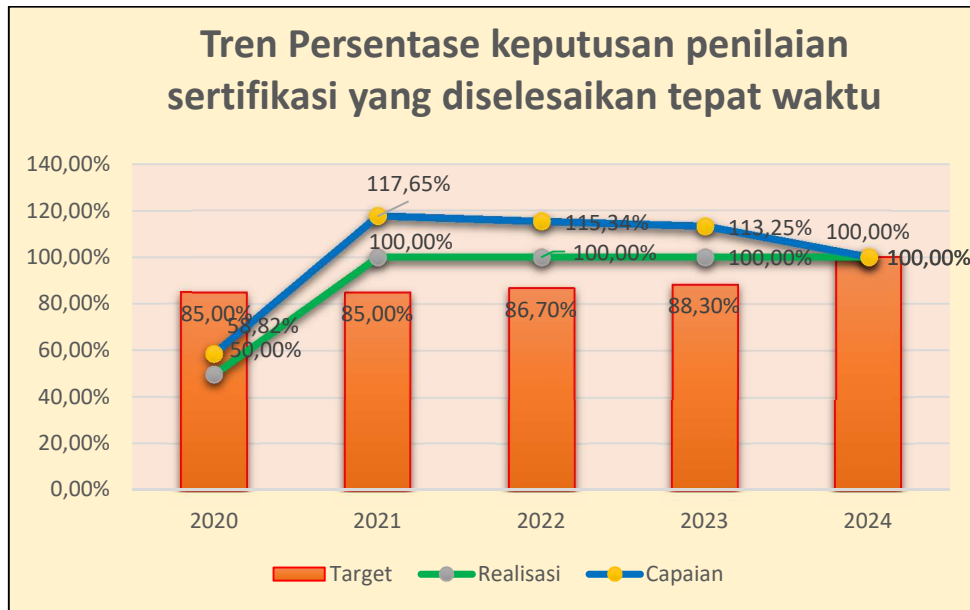


Gambar 10 Grafik Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020-2024

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan pada tahun 2020, 2021, 2023 & 2024. Sedangkan penurunan hanya terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 39,29% dan capaiannya 102,05% dari targetnya 38,50%.
- Kenaikan realisasi sebesar 35,18% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 655,87% dan capaiannya 137,23% dari targetnya 48,00%.
- Penurunan realisasi sebesar 39,76% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 55,56% dan capaiannya 97,47% dari targetnya 57,00%.
- Kenaikan realisasi terjadi pada tahun 2023 senilai 5,35%, dengan realisasi sebesar 67,86% dan capaiannya 102,82% dari targetnya 66,00%.
- Kenaikan realisasi sebesar 2,26% terjadi pada tahun 2024, dengan realisasi 78,81% dan capaiannya 105,08% dari targetnya 75,00%.

Secara keseluruhan, realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Penurunan terjadi pada tahun 2022 disebabkan dari total 108 tindak lanjut/rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha, hanya terdapat 60 rekomendasi yang direspon/ ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (55,56%). Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan respon pelaku usaha adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan dalam melakukan operasional.



Gambar 11 Grafik Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Realisasi mencapai angka 100% setiap tahunnya pada tahun 2021-2024. Untuk capaiannya kenaikannya terjadi pada tahun 2020-2021 & penurunannya terjadi pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 50% dan capaiannya 58,82% dari targetnya 85,00%.
- Kenaikan capaian sebesar 58,83% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 100,00% dan capaiannya 117,65% dari targetnya 85,00%.
- Penurunan capaian sebesar 2,31% terjadi pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 115,34% dari targetnya 86,70%.
- Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2023 senilai 2,09%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 113,25% dari targetnya 88,30%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 sebesar 13,25%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 100%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 12% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 88,30% dan pada tahun 2024 target mencapai 100%.

Pada tahun 2020 kinerja indikator ini belum maksimal dikarenakan dari dua permohonan rekomendasi/sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB hanya satu rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan. Kemudian tahun 2021-2024 terdapat peningkatan kinerja yang dapat dilihat dari tren indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi

yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Faktor penunjang peningkatan kinerja pada indikator ini adalah Sistem pengajuan sertifikasi pada web sertifikasicdob.pom.go.id memungkinkan pemantauan terhadap waktu untuk setiap tahapan proses, sehingga petugas dapat melakukan monitoring pemenuhan persyaratan CPPOB agar sarana menyelesaikan pengajuan tepat waktu. Kemudian pendampingan kepada pelaku usaha terus ditingkatkan melalui proaktif dan rutin memeriksa progres pengajuan di aplikasi untuk memantau perkembangan dan mengidentifikasi kendala.



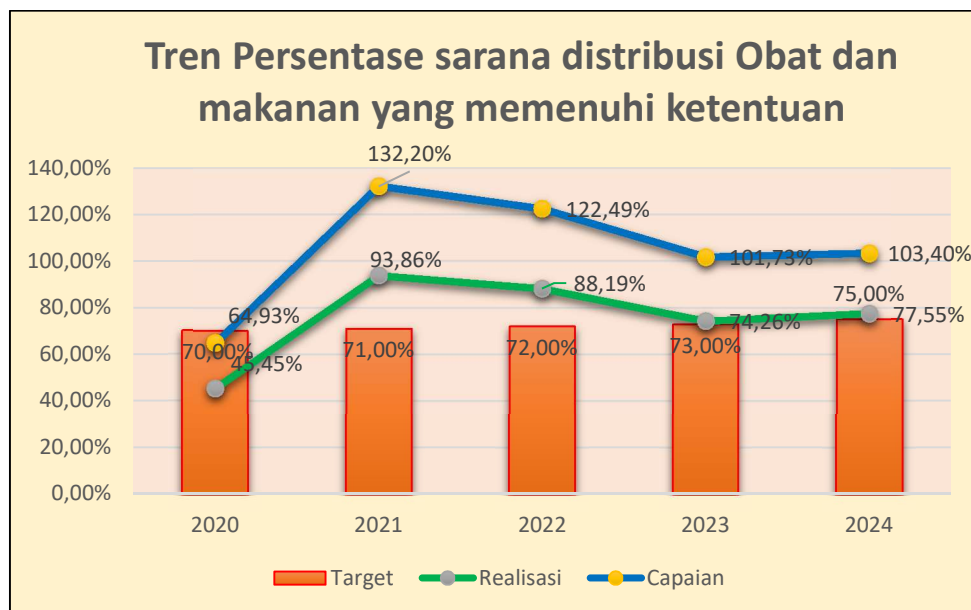
Gambar 12 Grafik Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Berdasarkan grafik, indikator ini mengalami kenaikan realisasi setiap tahunnya yaitu pada 2020-2023. Sedangkan penurunan hanya terjadi di tahun 2024. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 28,57% dengan capaiannya 39,68% dari targetnya 72,00%.
- Kenaikan capaian sebesar 69,45% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 78,57% dan capaiannya 109,13% dari targetnya 72,00%.
- Penurunan capaian sebesar 0,98% terjadi pada tahun 2022 dengan realisasinya 78,95% dan capaiannya 108,15% dari targetnya 73,00%.
- Kenaikan capaian terjadi pada tahun 2023 senilai 4,46%, dengan realisasi sebesar 83,33% dan capaiannya 112,61% dari targetnya 74,00%.

- Penurunan terjadi pada tahun 2024 sebesar 20,92%, dengan realisasi sebesar 76,47% dan capaiannya 91,69%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 9,4% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 74,00% dan pada tahun 2024 target mencapai 83,40%.

Tren indikator Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020-2023 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Penurunan terjadi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh dari 17 sarana produksi yang diperiksa di periode tahun 2024 ada 13 sarana MK dan 4 sarana TMK. Sarana TMK yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Toba adalah sarana PIRT yang cenderung tidak memenuhi ketentuan yang disebabkan ketidaksesuaian/temuan pada sarana PIRT tersebut mayoritas kategori kritis dan serius. Rendahnya kepatuhan sarana Produksi IRTP dalam penerapan peraturan serta kelalaian sarana PIRT dalam menerapkan higiene dan sanitasi berpengaruh signifikan TMK sarana produksi yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Toba.

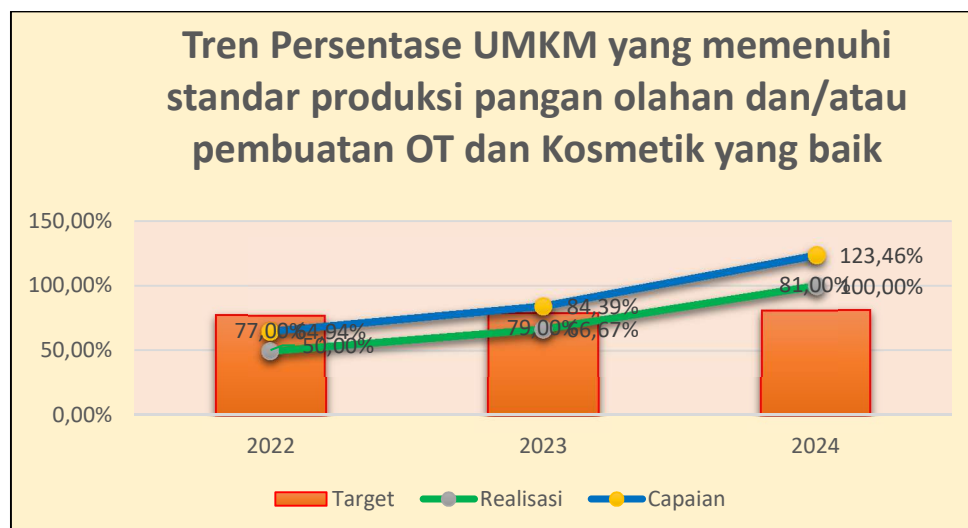


Gambar 13 Grafik Persentase sarana produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024

Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Berdasarkan grafik, indikator ini mengalami kenaikan realisasi dan capaiannya setiap tahunnya yaitu pada 2020, 2021, 2024. Sedangkan penurunan terjadi di tahun 2022 & 2023. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 45,45% dengan capaiannya sebesar 64,93% dari targetnya 70%.
- Kenaikan capaian sebesar 24% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 93,86% dan capaiannya 132,20% dari targetnya 71,00%.
- Penurunan capaian sebesar 9,71% terjadi pada tahun 2022 dengan realisasinya 88,19% dan capaiannya 122,49% dari targetnya 72,00%.
- Kenaikan capaian terjadi pada tahun 2023 senilai 20,76%, dengan realisasi sebesar 74,26% dan capaiannya 101,73% dari targetnya 73,00%.
- Penurunan terjadi pada tahun 2024 sebesar 1,67%, dengan realisasi sebesar 77,55% dan capaiannya 103,40%. Meski demikian, Penurunan tersebut tidak dikatakan signifikan karena diikuti dengan kenaikan jumlah target sebesar 2% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 73,00% dan pada tahun 2024 target mencapai 75,00%.

Jika dilihat dari tren, realisasi kinerja indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020-2024 ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dan sedikit meningkat pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan sarana yang diperiksa setiap tahun sebagian besar berbeda (diutamakan sarana-sarana yang belum pernah diperiksa), selain itu juga pemilihan sarana yang akan diperiksa berdasarkan analisis risiko sehingga besar kemungkinan sarana yang akan diperiksa tidak memenuhi ketentuan.



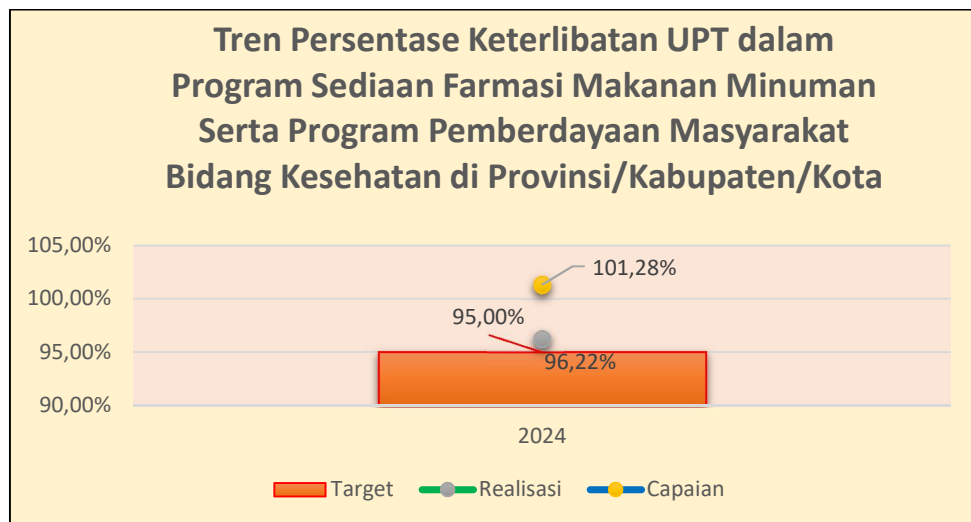
Gambar 14 Grafik Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022-2024

Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022-2024 mengalami kenaikan realisasi & capaian setiap tahunnya. Pada tahun 2022-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2022 dengan realisasi 50% dan capaiannya sebesar 64,93% dari targetnya 77%.
- Kenaikan capaian sebesar 19,45% terjadi pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 66,67% dan capaiannya 84,39% dari targetnya 79,00%.
- Kenaikan capaian terjadi pada tahun 2024 sebesar 39,07%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaiannya 123,46% dari targetnya 81,00%.

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Toba mengalami peningkatan dari tahun 2022, bahkan mampu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Loka POM Toba mendampingi 4 sarana dan menerbitkan 4 sertifikat sehingga capaian terhadap target 2024 (81%) melebihi 120%. Keberhasilan kinerja indikator ini didukung oleh koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan terutama pelaku usaha mikro.

Sedangkan tahun 2020 dan 2021, indikator ini belum menjadi indikator utama Loka POM di Kabupaten Toba.

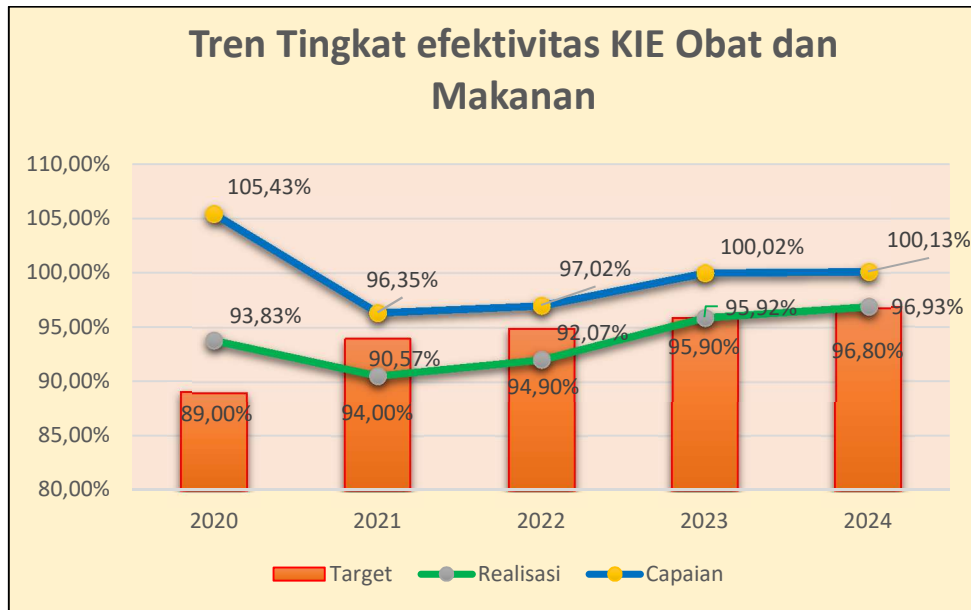


Gambar 15 Grafik Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator yang baru ada di tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 96,22% dari targetnya 95%, dengan capaiannya 101,28. Sehingga dapat disimpulkan, indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan kinerja indikator ini didukung oleh Koordinasi yang baik dengan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba serta hubungan kerja sama lintas sektor melalui kegiatan FKP dan komunikasi via telepon maupun grup *WhatsApp* memastikan program dan kegiatan berjalan optimal dengan dukungan pemerintah setempat.

Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Loka POM di Kabupaten Toba berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Loka POM di Kabupaten Toba perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media social.



Gambar 16 Grafik Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020-2024

Indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan realisasi dan capaiannya setiap tahunnya yaitu pada 2022-2024. Sedangkan penurunan hanya terjadi di tahun 2021. Pada tahun 2020-2024, terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

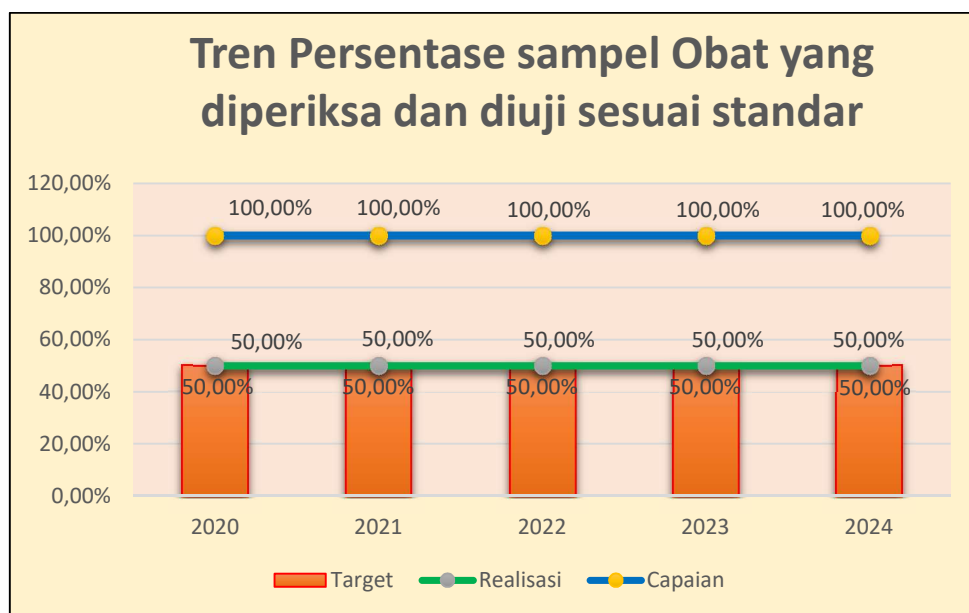
- Pada tahun 2020 dengan realisasi 93,83% dengan capaiannya 105,43% dari targetnya 89,00%.
- Penurunan capaian sebesar 5% terjadi pada tahun 2021, dengan realisasi sebesar 90,57% dan capaiannya 96,35% dari targetnya 94,00%.
- Kenaikan capaian sebesar 0,67% terjadi pada tahun 2022 dengan realisasinya 92,07% dan capaiannya 97,02% dari targetnya 94,90%.
- Kenaikan capaian terjadi pada tahun 2023 senilai 3%, dengan realisasi sebesar 95,92% dan capaiannya 100,02% dari targetnya 95,90%.
- Penurunan capaian terjadi pada tahun 2024 senilai 0,11% dengan realisasi sebesar 96,93% dan capaiannya 100,13% dari targetnya 96,80%.

Secara keseluruhan, tren indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan KIE dilakukan dengan berbagai ragam kegiatan untuk dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat dari golongan usia, jenis kelamin, pendidikan, maupun pekerjaan dengan dilakukannya KIE Langsung melalui Penyebaran Informasi, Pameran ataupun Sosialisasi, KIE melalui Media Sosial, KIE melalui media elektronik (Talkshow dan Iklan Layanan Masyarakat) dan

juga KIE melalui media cetak (Leaflet dan Poster). Kemudian keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi KIE.

Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Toba mampu melindungi masyarakat dengan optimal.



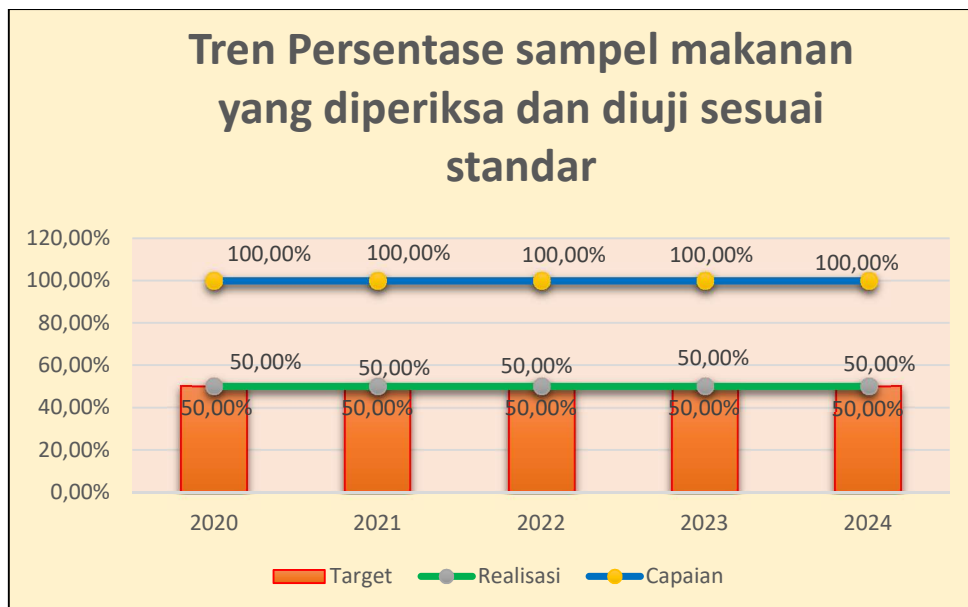
Gambar 17 Grafik Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020-2024 tidak mengalami kenaikan realisasi dan capaiannya setiap tahunnya. Berdasarkan grafik, realisasi dan capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sama nilainya setiap tahunnya. Tidak terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.
- Pada tahun 2021 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.

- Pada tahun 2022 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.
- Pada tahun 2023 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Toba terus mencapai target dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini dengan melakukan koordinasi rutin antara Pemeriksaan dan Balai Penguji dalam perencanaan, penyusunan target, dan pengujian sesuai pedoman sampling, yang didukung penyusunan program kegiatan serta monitoring dan evaluasi bulanan, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sampling berjalan optimal.



Gambar 18 Grafik Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020-2024 tidak mengalami kenaikan realisasi dan capaiannya setiap tahunnya. Berdasarkan grafik, realisasi dan capaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sama nilainya setiap tahunnya. Tidak terjadi kenaikan target disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

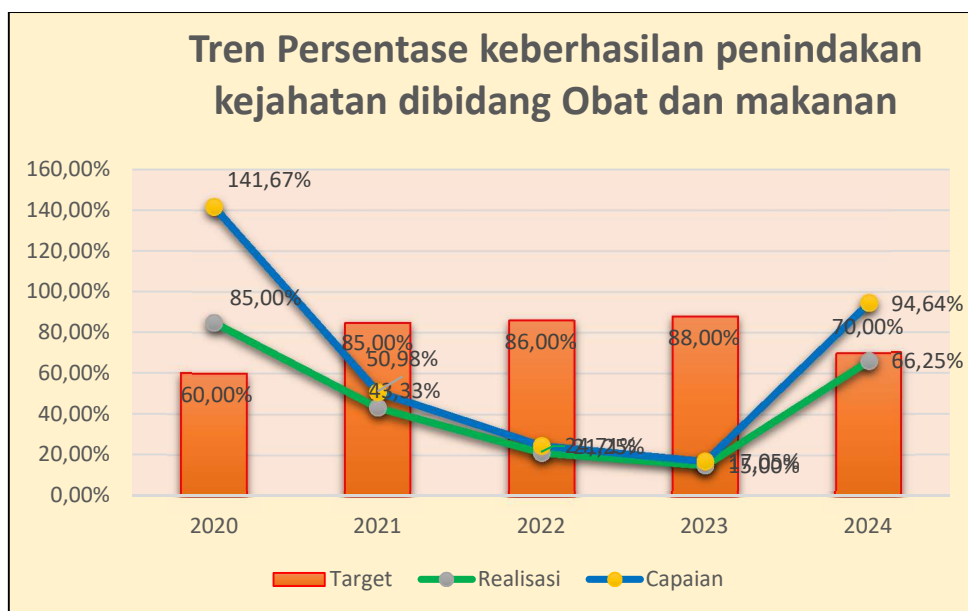
- Pada tahun 2020 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.
- Pada tahun 2021 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.

- Pada tahun 2022 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.
- Pada tahun 2023 dengan realisasi 50,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 50,00%.

Secara keseluruhan, realisasi & capaian indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Kemampuan petugas dalam melakukan sampling makanan sesuai pedoman diperkuat melalui monitoring dan evaluasi kegiatan sampling yang dilakukan setiap bulan menjadi faktor utama keberhasilan kinerja indikator ini.

Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa.



Gambar 19 Grafik Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Berdasarkan grafik, realisasi dan

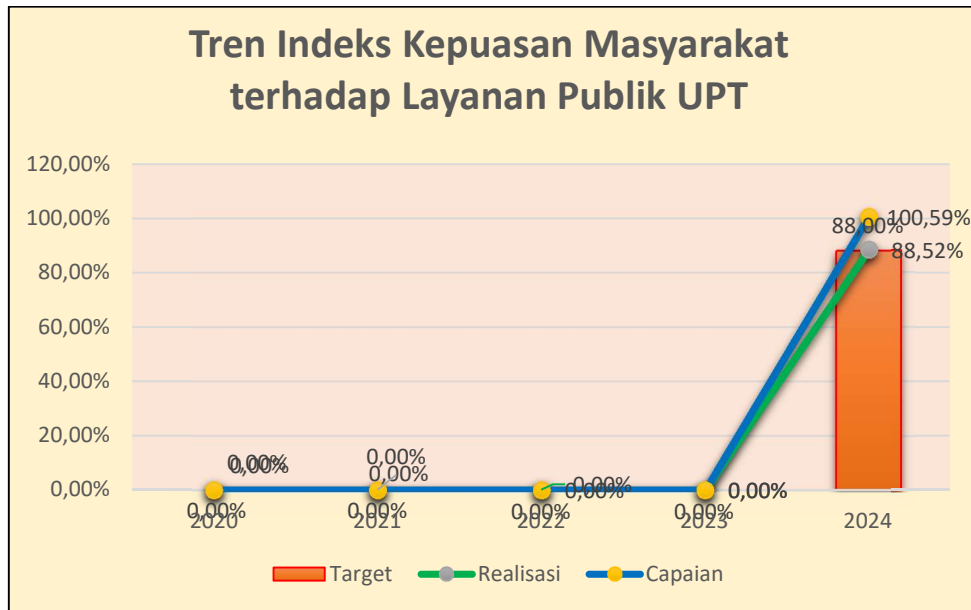
capaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan makanan mengalami penurunan realisasi dan capaian pada tahun 2021-2023. Kenaikan hanya terjadi pada tahun 2024. Tidak terjadi kenaikan target disetiap tahunnya yaitu pada 2020-2023, sedangkan penurunan target terjadi pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 85,00% dengan capaiannya 141,67% dari targetnya 60,00%.
- Pada tahun 2021 dengan realisasi 43,33% dengan capaiannya 50,98% dari targetnya 85,00%.
- Pada tahun 2022 dengan realisasi 21,25% dengan capaiannya 24,71% dari targetnya 86,00%.
- Pada tahun 2023 dengan realisasi 15,00% dengan capaiannya 17,05% dari targetnya 88,00%.

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba mengalami penurunan dari 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyebab kegagalan indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya keterbatasan PPNS dalam melakukan Kegiatan Intelijen, Wasmatlitrik, operasi penindakan, rangkaian penyidikan dan koordinasi dalam menyelesaikan 2 Perkara. Kedua, pada wilayah Loka POM di Kabupaten Toba Pelanggaran/Kejahatan obat dan makanan yang ditemukan, sebagian besar dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik kefarmasian tanpa hak dan kewenangan terkait obat keras. Kemudian, adanya penambahan recathment area sehingga perlu dilakukan wasmatlitrik untuk pemetaan wilayah, deteksi potensi kejahatan, pembentukan jaringan informasi, dan penggalangan masyarakat guna mendukung keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.

Sasaran Kegiatan Ke-6: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.



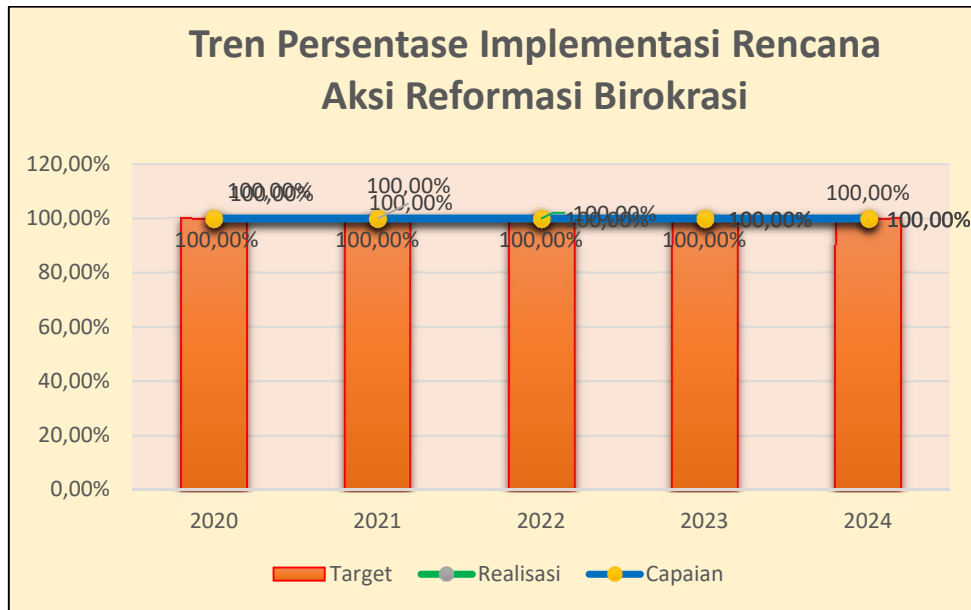
Gambar 20 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT merupakan indikator yang baru ada di tahun 2024. Sehingga indikator tersebut belum bisa dibuat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, indikator ini telah mencapai target dengan realisasi 88.52% dari targetnya 88% dengan perolehan capaian mencapai 100.59%. Dengan demikian, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT telah mencapai target. Untuk meningkatkan kinerja, beberapa upaya perbaikan kinerja yang perlu dilakukan yaitu dengan konsisten melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Biaya/Tarif. Kemudian terus berupaya melakukan perbaikan terhadap pelayanan atau keluhan yang diterima baik secara langsung maupun melalui online. Kemudian terus berinovasi berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan di lingkup Loka POM di Kabupaten Toba.

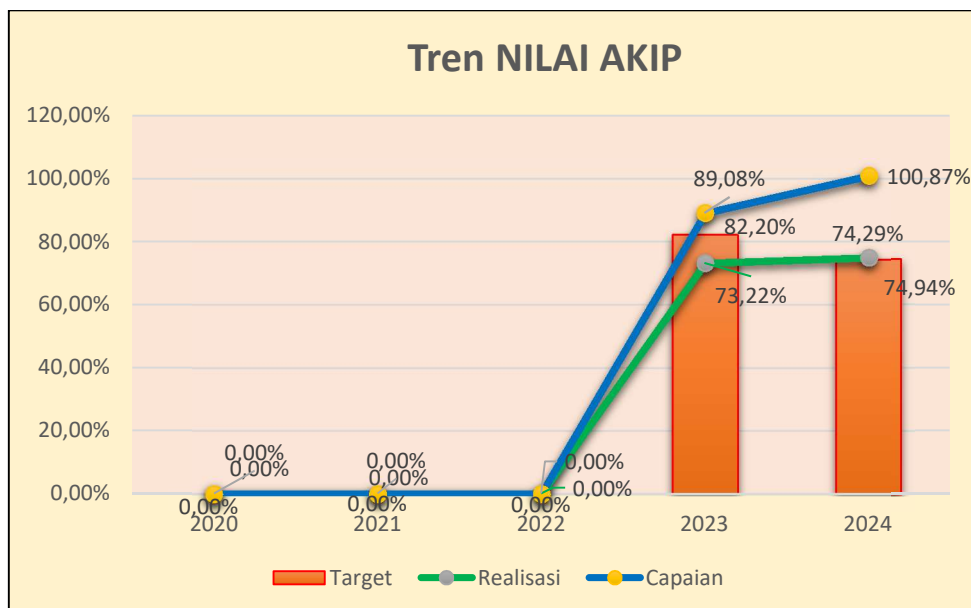
Sasaran Kegiatan Ke-7: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.



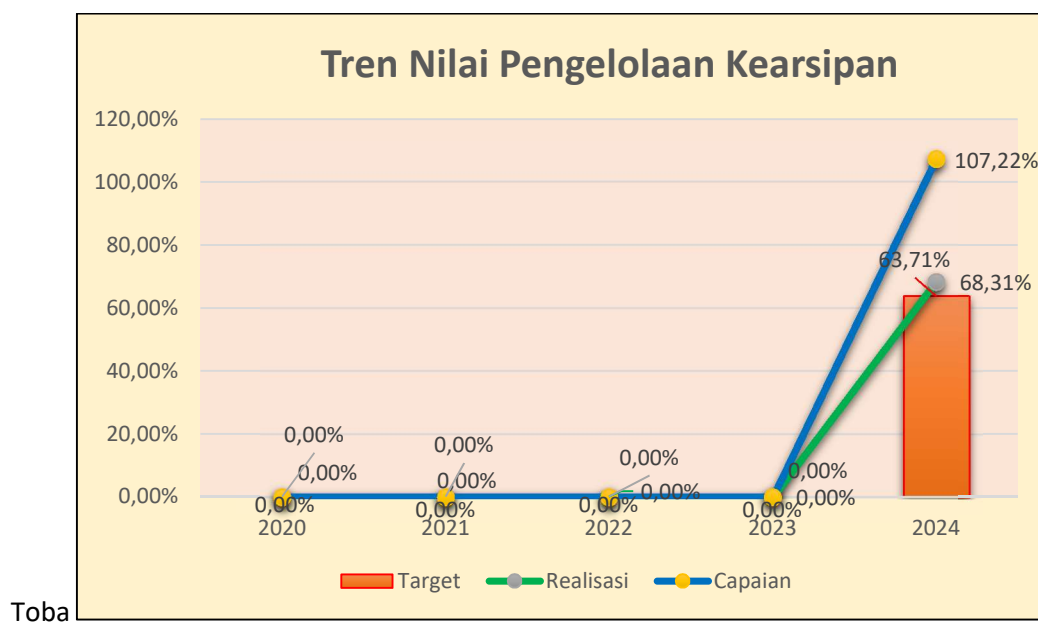
Gambar 21 Grafik Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan makanan

Indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024 bergerak secara konsisten. Berdasarkan grafik, realisasi dan capaian indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi secara konsisten selama 5 (lima) tahun mencapai target dengan capaian 100% dengan realisasinya 100% dari targetnya 100. Sehingga dapat diketahui, indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024 telah mencapai target yang ditentukan. Faktor penghambat dalam realisasi indikator ini yaitu monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RB belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.



Gambar 22 Grafik Nilai AKIP

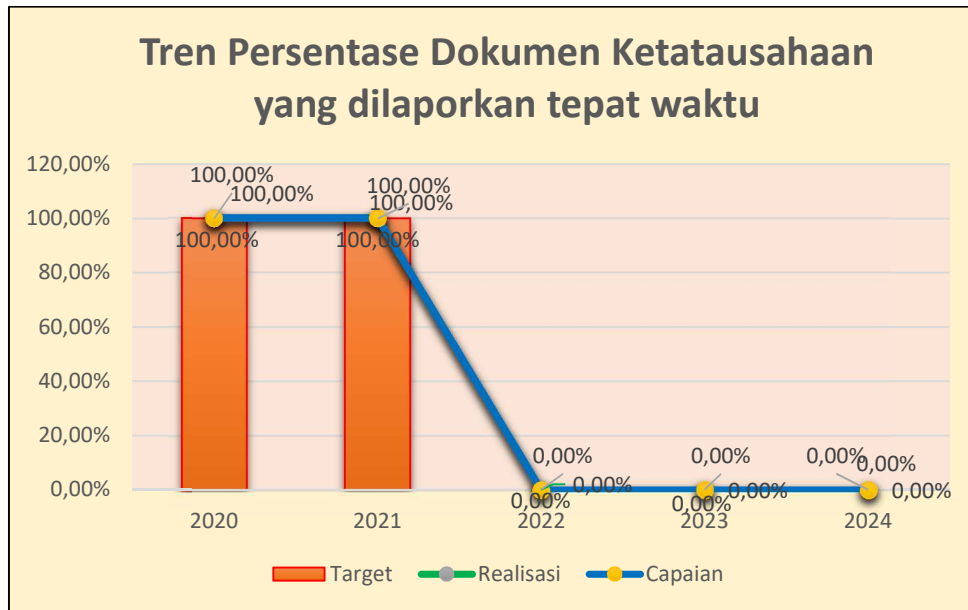
Realisasi kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Toba mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya, terjadi penurunan target sebesar 7,91% dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi nilai AKIP Loka POM di Kabupaten toba mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat capaian tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Toba sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Loka POM di Kabupaten Toba terus berupaya untuk meningkatkan Nilai AKIP dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 23 Grafik Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2024. Sehingga capaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan hanya dapat dinilai pada tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yaitu 107,22% dari realisasinya 68,31% dan targetnya 63,71%.

Dengan demikian, dapat diketahui indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditentukan. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh Seluruh pegawai berkomitmen melaksanakan pengelolaan arsip sesuai tata naskah dinas, didorong untuk terus mengikuti pengembangan kompetensi melalui IDEAS maupun pelatihan luar BPOM, serta melakukan peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan arsip UK dan UP di Loka POM Toba.

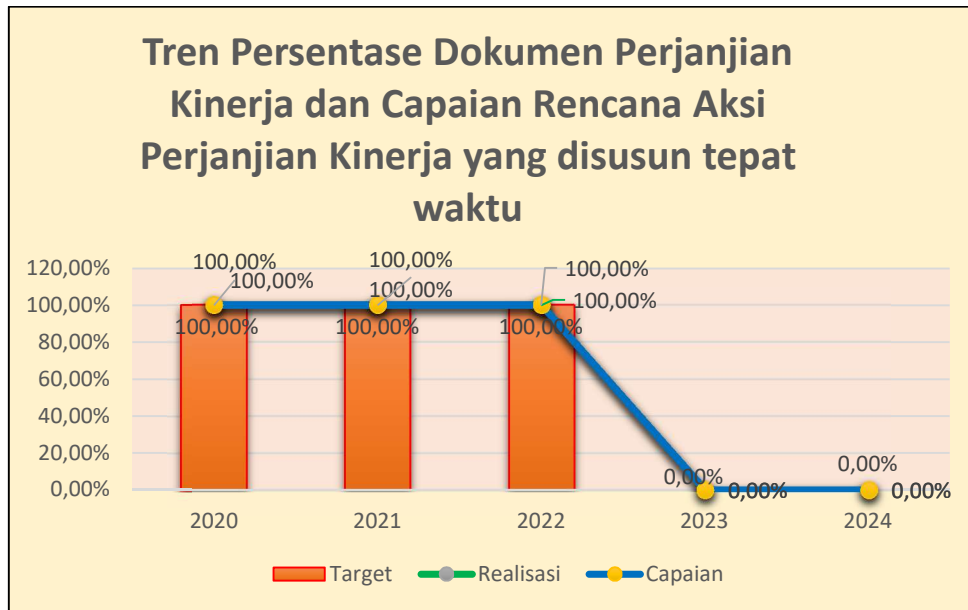


Gambar 24 Grafik Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu merupakan indikator yang ada pada tahun 2020-2021. Sementara tahun 2022-2024 indikator ini bukan menjadi indikator utama pada Loka POM di Kabupaten Toba. Sehingga indikator ini dapat dinilai pada 2 tahun tersebut yaitu 2020 & 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 100,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 100,00%.
- Pada tahun 2021 dengan realisasi 100,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 100,00%.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2020-2021 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh perencanaan kebutuhan dokumen yang baik dan monitoring secara berkala terhadap dokumen ketatausahaan yang telah selesai dilaksanakan.



Gambar 25 Grafik Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu merupakan indikator yang ada pada tahun 2020-2022, sehingga indikator ini dapat dinilai pada 3 (tiga) tahun tersebut. Berdasarkan grafik, indikator tersebut bergerak secara konsisten dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dengan realisasi 100,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 100,00%.
- Pada tahun 2021 dengan realisasi 100,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 100,00%.
- Pada tahun 2022 dengan realisasi 100,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 100,00%.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun 2020-2024 telah mencapai dari target yang ditetapkan. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh dokumen Perjanjian kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilaksanakan telah sesuai dengan jadwal serta evaluasi internal dilaksanakan secara bulanan dan triwulan dan dilaporkan ke Biro Perencanaan Badan POM.

Sasaran Kegiatan ke-8: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.



Gambar 26 Grafik Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Berdasarkan grafik, kenaikan target terjadi setiap tahunnya dengan capaian dan realisasi sebagai berikut :

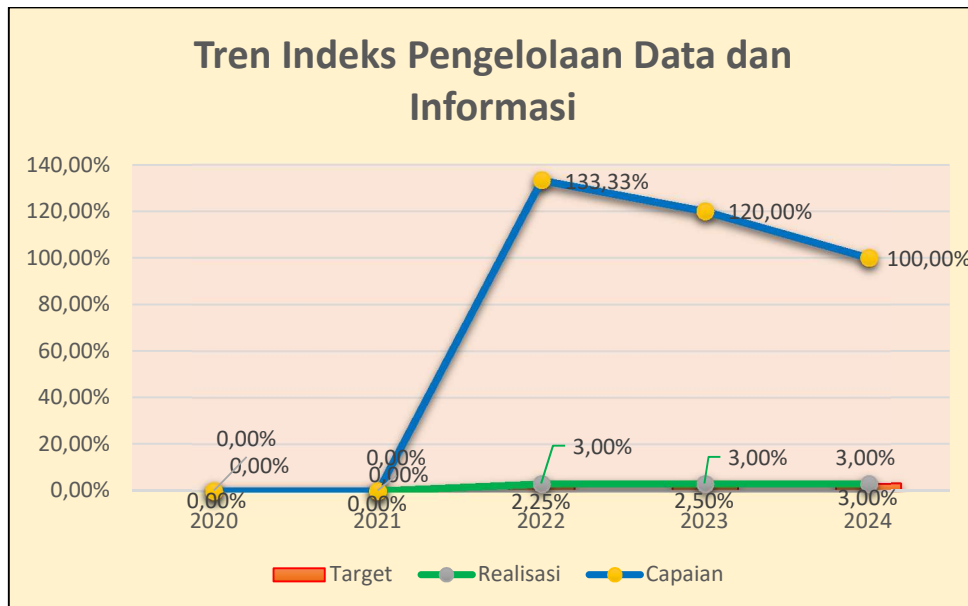
- Pada tahun 2020 dengan realisasi 83,28% dengan capaiannya 111,04% dari targetnya 75%.
- Pada tahun 2021 dengan realisasi 85,83% dengan capaiannya 102,79% dari targetnya 83,50%.
- Pada tahun 2022 dengan realisasi 84,88% dengan capaiannya 101,05% dari targetnya 84,00%.
- Pada tahun 2023 dengan realisasi 89,50% dengan capaiannya 105,92% dari targetnya 84,50%.
- Pada tahun 2024 dengan realisasi 85,88% dengan capaiannya 95,09% dari targetnya 90,31%.

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Toba pada tahun 2024 terjadi peningkatan target sebesar 5,81%. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN. Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan

PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

Sasaran Kegiatan ke-9: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.



Gambar 27 Grafik Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022-2024. Sehingga indikator ini dapat dinilai pada 3 (tiga) tahun yaitu pada 2022, 2023 dan 2024. Berdasarkan grafik, capaian setiap tahunnya mengalami penurunan, namun diikuti dengan kenaikan target setiap tahunnya. Dengan rincian sebagai berikut :

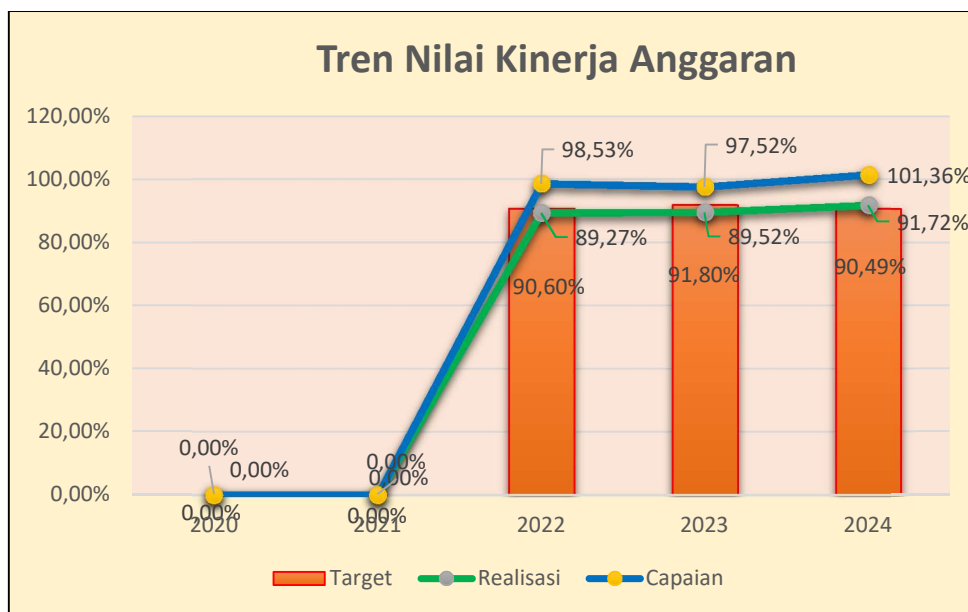
- Pada tahun 2022 dengan realisasi 3,00% dengan capaiannya 133,33% dari targetnya 2,25%.

- Pada tahun 2023 dengan realisasi 3,00% dengan capaiannya 120,00% dari targetnya 2,50%.
- Pada tahun 2024 dengan realisasi 3,00% dengan capaiannya 100% dari targetnya 3,00%.

Meski terjadi penurunan capaian setiap tahunnya, namun target tetap tercapai secara konsisten di angka 3,00%. Dengan demikian, indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2020-2024 dapat diketahui telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini yaitu monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan email corporate Terus meningkatkan pemanfaatan email pegawai dan dashboard BOC Dengan demikian, indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2020-2024 dapat diketahui telah mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya.

Sasaran Kegiatan ke-10: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Loka POM di Kabupaten Toba dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.



Gambar 28 Grafik Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2022. Sehingga penilaian indikator ini dapat dinilai pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu

2022,2023, dan 2024. Berdasarkan grafik, dapat diketahui terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 sebesar 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Namun terdapat kenaikan target sebesar 1,20% pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2022 dengan realisasi 89,27% dengan capaiannya 98,53% dari targetnya 90,60%.
- Pada tahun 2023 dengan realisasi 89,52% dengan capaiannya 97,52% dari targetnya 91,80%.
- Pada tahun 2024 dengan realisasi 91,72% dengan capaiannya 101,36% dari targetnya 90,49%.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2024 belum berhasil mencapai target dipengaruhi secara signifikan oleh rendahnya Deviasi Halaman III DIPA pada komponen penilaian IKPA yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menimbulkan GAP yang cukup tinggi dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan batas minimal realisasi tiap jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang,dan belanja modal yang diatur dan ditetapkan batas minimal realisasi tiap belanja untuk setiap triwulan anggaran tahun berjalan.

Pada komponen penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) belum mencapai target karena rendahnya nilai efisiensi yang disebabkan oleh penyerapan anggaran yang tinggi sementara tidak diikuti realisasi output yang tinggi, karena penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran capaian output harus lebih besar dari pada realisasi anggaran agar nilai efisiensi meningkat.

1.1.2. Aspirasi Stakeholder

Seiring dengan perkembangan zaman, pengawasan obat dan makanan harus terus beradaptasi dan inovasi secara berkelanjutan. Aspirasi dan masukan dari masyarakat sangat penting bagi BPOM untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan

Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjaring feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat diseluruh indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis wordcloud dari feedback dan saran masukan dari masyarakat.



Gambar 29 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat

Beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Adapun di tingkat lokal, aspirasi masyarakat juga mencerminkan berbagai isu utama yang dihadapi Loka POM Kabupaten Toba, yaitu

1. Pelaku usaha kesulitan dalam melengkapi dokumen persyaratan. Kebutuhan pelaku usaha ini dijawab dengan pendampingan, baik secara daring maupun luring;
2. Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi, petugas Loka POM Toba juga melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi;

3. Biaya yang dirasa masih tinggi bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendaftarkan produknya. Loka POM Toba konsisten melakukan sosialisasi terkait tarif PNBPN di Badan POM serta memberikan potongan biaya sebesar 50% untuk UMKM.

Loka POM di Kabupaten Toba percaya bahwa pengawasan obat dan makanan adalah tugas dinamis yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat tidak hanya menjadi subjek pengawasan, tetapi juga aktor strategis yang dapat mendukung upaya ini dengan menjadi konsumen yang cerdas. Melalui penjangkaran aspirasi, Loka POM di Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program pengawasannya agar tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjawab kebutuhan lokal.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan pada unit kerja Loka POM di Kabupaten Toba, dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Toba perlu dilakukan analisis secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di kabupaten Toba, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Toba, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Pemimpin memiliki komitmen untuk meningkatkan standar pelayanan dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memadai. Komitmen kepemimpinan tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu layanan publik, efektivitas pengawasan, atau kinerja SDM.



Gambar 30 IPP Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM tahun 2024 dan 2025

Komitmen pimpinan ini diwujudkan melalui upaya nyata, termasuk perencanaan pembangunan gedung kantor di atas lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Toba seluas 6.094 m² yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM. Loka POM di Kabupaten Toba tidak hanya mengamankan asset tersebut melalui pemagaran dan pematangan lahan, tetapi juga terus berupaya merealisasikan pembangunan gedung kantor sendiri.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Loka POM di Kabupaten Toba tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Toba telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Komitmen kepemimpinan terhadap akuntabilitas dibuktikan melalui capaian yang diperoleh dari berbagai penghargaan oleh Loka POM di Kabupaten Toba, antara lain:

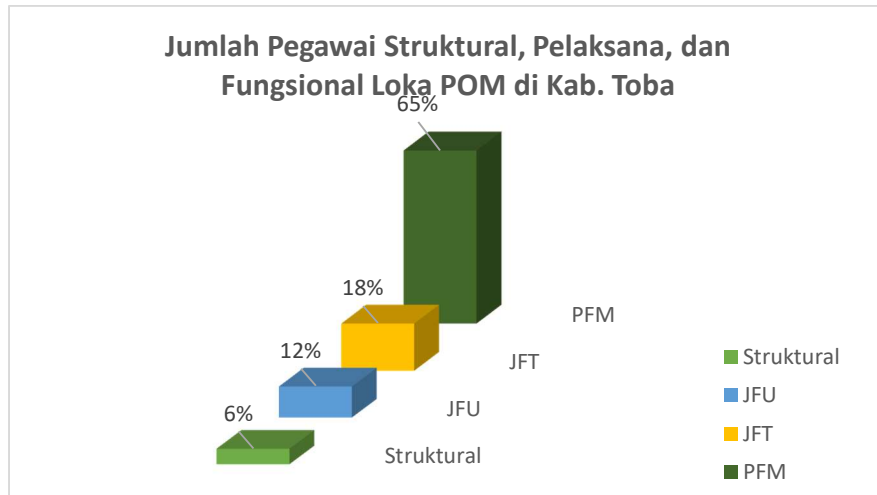
- Peringkat Pertama Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2022
- Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Triwulan IV Tahun 2022 dari KPPN Balige
- Peringkat Kedua Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Balige

- d. Peringkat Kedua Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Semester II Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Balige
- e. Apresiasi Pengguna Layanan Aplikasi Digital Payment Satu Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Balige
- f. Penghargaan Sebagai Unit Kerja Pelaksana Teknis dengan Kategori “Engagement Tertinggi” Hasil Survei Opini Tahun 2022 di Lingkungan BPOM
- g. Peringkat Kedua Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Semester I Tahun 2024 dari KPPN Balige
- h. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 Dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori “Baik” pada bulan November 2024
- i. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM kategori PPID Pelaksana UPT “Menuju Informatif” pada 3 Desember 2024
- j. Piagam Penghargaan atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024 yang diterima 2 Januari 2025
- k. Piagam Penghargaan sebagai UPT BPOM dengan Persentase Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat Tertinggi ke-3 yang diterima 10 Februari 2025
- l. Loka Terbaik 1 pada kategori Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang diterima pada 30 Juni 2025
- m. Loka Terbaik 3 pada kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan pada 30 Juni 2025
- n. Loka Terbaik 3 pada kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang diterima pada 30 Juni 2025
- o. Peringkat Kedua Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Triwulan II Tahun 2025 dari KPPN Balige yang diterima pada 15 Juli 2025

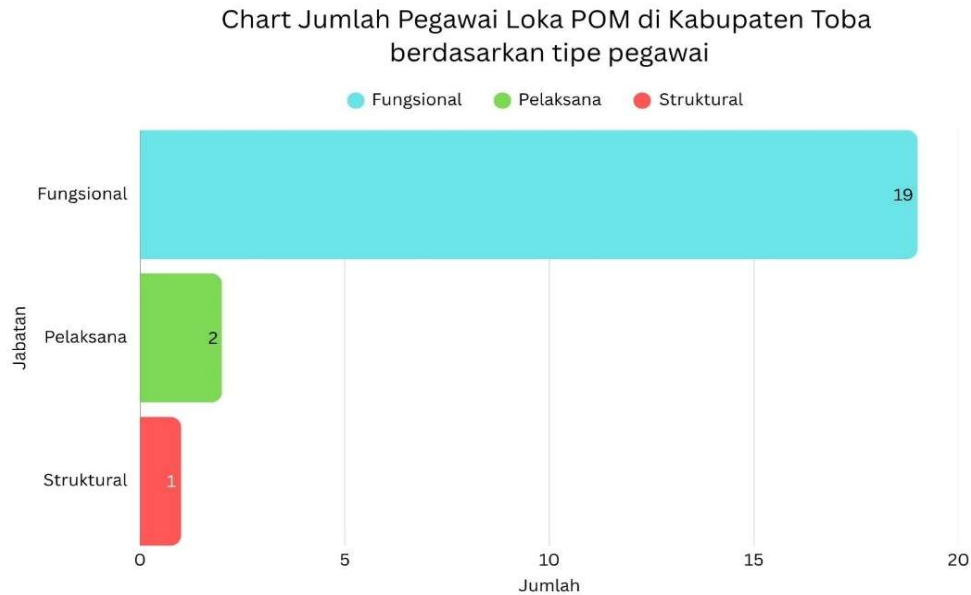
2. Kompetensi teknis dan Komposisi SDM Loka POM di Kabupaten Toba

Loka POM di Kabupaten Toba didukung oleh pegawai yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, sampai dengan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Toba didukung dengan 65% tenaga teknis atau sebanyak 11 pegawai yang merupakan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan.

Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Toba juga didukung dengan 17% (sebanyak 3 orang) Fungsional lainnya, serta 18 % merupakan Pejabat Struktural (sebanyak 1 orang) dan Pelaksana (sebanyak 2 orang).



Gambar 31 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional Loka POM di Kabupaten Toba



Gambar 32 Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Toba berdasarkan tipe pegawai

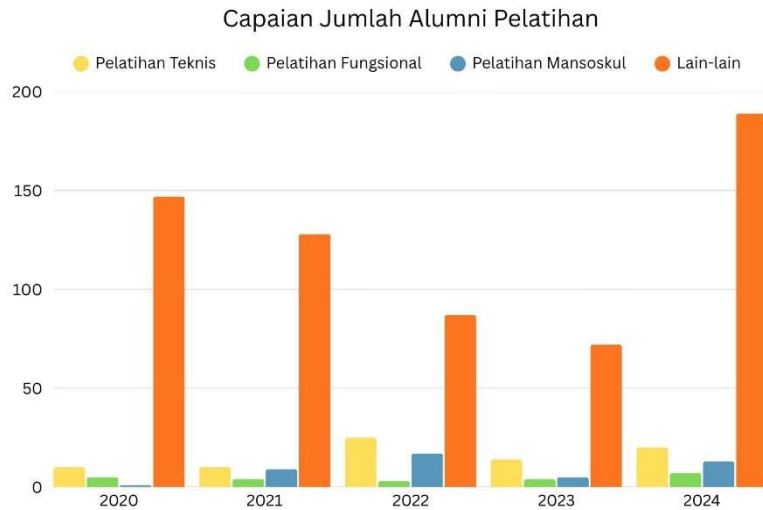
TABEL 2 JUMLAH PEGAWAI LOKA POM DI KABUPATEN TOBA PER JABATAN FUNGSIONAL

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
2	Penata Laksana Barang Terampil	1
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	3
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	9
5	Perencana Ahli Pertama	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
TOTAL		19

Sumber data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BPOM, per 05 November 2025

Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan SDM Loka POM di Kabupaten Toba merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan dan kontaminan baru, serta kebutuhan akan metodologi pengujian terkini, serta pengawasan terhadap program prioritas Presiden MBG menuntut penguatan kapabilitas SDM secara berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Toba secara konsisten melaksanakan penilaian, pengembangan, dan sertifikasi kompetensi SDM. Hasil penilaian kompetensi periode 2020–2024 menjadi dasar dalam merancang program pengembangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pada periode 2020–2024, Loka POM di Kabupaten Toba telah melatih SDM-nya melalui berbagai jenis pelatihan, yaitu Pelatihan Teknis sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) peserta, Pelatihan Fungsional sebanyak 23 (dua puluh tiga) peserta, serta Pelatihan Manajerial Sosial Kultural sebanyak 45 (empat puluh lima) peserta. Selain itu, tercatat 623 (enam ratus dua puluh tiga) peserta mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, kursus dan lainnya yang mencakup pelatihan teknis pendukung tugas, penguatan kapasitas umum, serta internalisasi nilai-nilai organisasi. Tren penyelenggaraan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

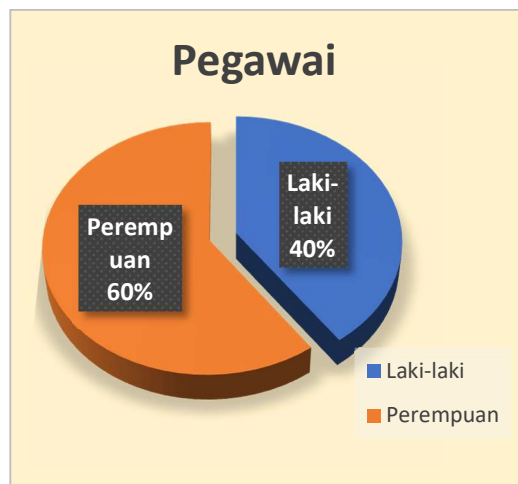


Gambar 33 Capaian jumlah alumni pelatihan dari tahun 2020 sampai 2024

Pada Juni 2025, Loka POM di Kabupaten Toba juga mendapat penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 6 orang yang akan ditempatkan pada fungsi teknis sebanyak 2 orang dan 4 orang di Tata Usaha

Untuk mendukung kompetensi pegawai, Loka POM di Kabupaten Toba menggunakan beragam metode pengembangan kompetensi, mulai dari tugas belajar hingga pelatihan, yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun *online*.

Selain didukung dengan kompetensi pegawai, Loka POM di Kabupaten Toba juga memiliki komposisi pegawai yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan memungkinkan loka POM di Kabupaten Toba untuk mendapatkan beragam perspektif dalam pelaksanaan tupoksinya. Komposisi pegawai Loka POM di Kabupaten Toba dengan proporsi besar pada generasi muda dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dalam hal inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.



Gambar 34 Komposisi pegawai Loka POM di Kabupaten Toba

3. Ekosistem Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

Kegiatan Komunikasi Infomarsi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan lebih ditekankan dalam pemberdayaan masyarakat karena masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Toba telah melakukan berbagai kegiatan berkelanjutan yang dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk Obat dan makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing, antara lain:

- a. Kolaborasi dengan Pemda melalui program bupati berkantor di desa untuk memberikan pelayanan dan informasi terkait obat dan makanan di daerah pelosok.
- b. Kolaborasi dengan Pemda pembuatan video edukasi terkait obat dan makanan (seperti CEK KLIK, Tolak penyalahgunaan Obat dan NAPZA, Resistensi anti Mikroba, Keamanan Pangan, Buang sampah Obat yang benar, Kosmetik yang aman, dan Obat bahan alam yang aman) bersama dengan bupati yang ditayangkan di videotron pemda dan medsos pemda untuk memperluas jangkauan informasi dan edukasi.
- c. Kolaborasi dengan media penyiaran (radio) dalam pelaksanaan edukasi untuk peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat terkait obat dan makanan.
- d. FGD dengan Organisasi Profesi, Pemda dan Pelaku Usaha dalam rangka penggalangan komitmen terkait penanggulangan resistensi anti mikroba dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan POM.
- e. Edukasi masif dan berkelanjutan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan: penyebaran leaflet edukasi di MPP setiap kali melakukan pelayanan, melakukan pameran dan KIE pada kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Bank Indonesia, Melakukan penyebaran Informasi di Pasar Tradisional, dan Melakukan KIE secara online melalui inovasi PARTOBA.

Melalui kegiatan edukasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba, mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan makanan dan mendorong perilaku konsumsi obat dan makanan yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BPOM dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif.

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Loka POM di Kabupaten Toba tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Loka POM di Kabupaten Toba menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Loka POM di Kabupaten Toba dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Toba, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Gap Kompetensi Pegawai

Bertambahnya cakupan wilayah Loka POM di Kabupaten Toba yang semula 4 kabupaten/Kota menjadi 9 Kabupaten/Kota, dan tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah SDM dapat mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi setiap individu. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kinerja. Keterbatasan SDM juga akan menghambat kemampuan Loka POM di Kabupaten Toba dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan yang tidak hanya terbatas pada operasional internal Loka POM di Kabupaten Toba, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

TABEL 3 KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN SDM TAHUN 2025

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Toba	10	Struktural	1	1	0	100%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
4	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
5	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	5	3	2	60%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	14	9	5	64%
8	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
9	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	1	2	-1	200%
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
12	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
16	Penata Kelola Obat dan Makanan	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
17	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
TOTAL				33	22	11	66,67%

Sumber data Dashboard SIREN SDM BPOM per 05 November 2025

Selain keterbatasan SDM, juga terdapat kesenjangan kompetensi di antara pegawai yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berpengaruh terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Toba. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi ini, diperlukan pelatihan yang seragam dan berkelanjutan.

2. Infrastruktur kurang memadai

Loka POM di Kabupaten Toba masih memiliki keterbatasan infrastruktur yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Hingga saat ini, Loka POM di Kabupaten Toba masih mengandalkan gedung sewa yang tidak sepenuhnya dirancang untuk kebutuhan teknis maupun administratif. Kondisi ini menyebabkan kapasitas ruang kerja, penyimpanan, serta fasilitas pendukung menjadi tidak ideal.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran menghambat pembangunan gedung kantor dan laboratorium yang representatif. Tanpa fasilitas laboratorium yang memadai, kemampuan pengujian internal sangat terbatas. Loka POM di Kabupaten Toba hanya mampu melakukan pengujian dasar melalui metode uji cepat, yang sifatnya screening awal dan belum dapat melakukan pengujian komprehensif. Dampaknya, sebagian besar sampel harus dikirim ke Balai Besar POM di Medan atau laboratorium regional lainnya. Ketergantungan ini berpotensi memperpanjang waktu penanganan kasus,

menghambat respons cepat pengawasan Obat dan Makanan, serta mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan infrastruktur juga berimplikasi pada aspek penegakan hukum. Ketidadaan ruang tahanan atau ruang khusus untuk melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan Obat dan Makanan menghambat proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Kondisi ini menyulitkan petugas apabila tersangka tidak kooperatif dan menghambat pemeriksaan terhadap tersangka dan penyerahan tersangka dan barang bukti, sehingga proses penyidikan sering kali harus dikoordinasikan dengan pihak eksternal yang memiliki fasilitas tersebut. Hal ini turut mempengaruhi efektivitas tindakan penindakan.

3. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Dalam rangka menghindari potensi tumpang tindih kewenangan maupun kebijakan, BPOM memerlukan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup seluruh aspek pengawasan obat dan makanan.

4. Terbatasnya dukungan peralatan dan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan

Terbatasnya dukungan peralatan dan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan masih menjadi kendala yang melemahkan efektivitas pengawasan Loka POM di Kabupaten Toba. Keterbatasan ini mencakup minimnya peralatan intelijen digital dan forensik siber, sistem informasi laboratorium yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta aplikasi penindakan yang data dan fungsinya terfragmentasi sehingga menyulitkan konsolidasi informasi di tingkat nasional. Akibatnya, respons terhadap temuan pelanggaran menjadi kurang optimal, koordinasi dengan *stakeholders* terhambat, dan potensi pelanggaran terkait obat dan makanan lebih sulit dideteksi maupun ditindak secara tepat waktu. Oleh karena itu, dukungan peralatan dan sistem teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan BPOM.

1.2.3. Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Toba untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

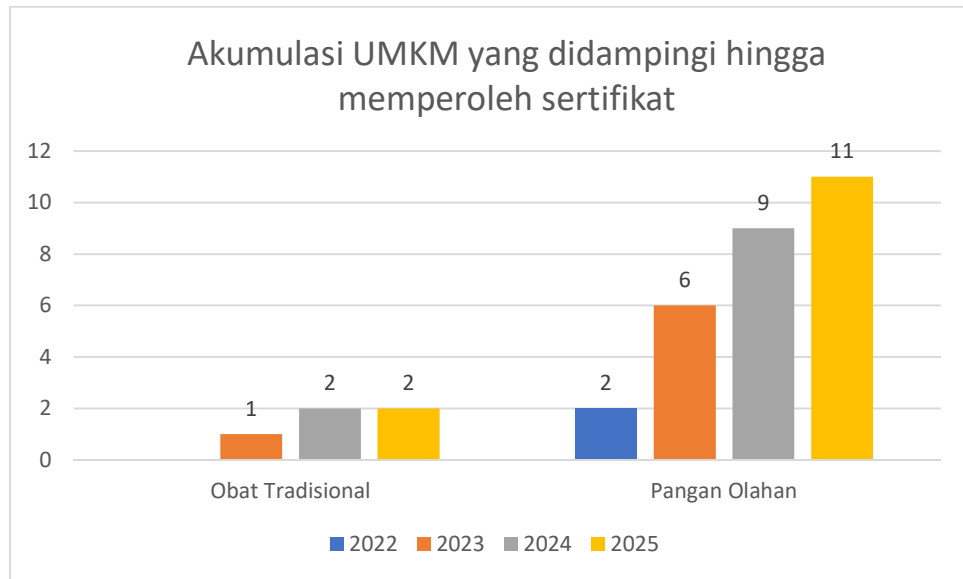
1. Kerja Sama lintas sektor

Peluang Loka POM di Kabupaten Toba untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Loka POM di Kabupaten Toba telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya. Loka POM di Kabupaten Toba menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba yang ditandai dengan terbentuknya SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Koordinasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba.

2. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

asar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan peluang bagi Loka POM di Kabupaten Toba untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Loka POM di Kabupaten Toba berada pada posisi strategis untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan jaminan bagi konsumen atas ketersediaan produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan kepastian bagi produsen dalam negeri bahwa mereka beroperasi pada pasar yang kompetitif dan adil. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Toba memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan daya saing industri obat dan makanan nasional di tingkat internasional. Salah satu bentuk kontribusinya adalah melalui program pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu memenuhi persyaratan legalitas dan standar mutu produk. Upaya pendampingan ini bertujuan memperkuat kualitas produk UMKM sehingga dapat memasuki pasar yang lebih luas. Kinerja pendampingan tersebut tercermin pada Akumulasi Pendampingan UMKM hingga

memperoleh sertifikat dari 1 Januari 2024 sampai 30 Oktober 2025, sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Gambar 35 Akumulasi Pendampingan UMKM hingga memperoleh sertifikat dari 1 Januari 2024 sampai 30 Oktober 2025

3. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Loka POM di Kabupaten Toba untuk melakukan pengawasan yang dinamis dan adaptif. Peluang Loka POM di Kabupaten Toba dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Loka POM di Kabupaten Toba dapat mengotomasi proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Toba dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Toba untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Pemanfaatan digitalisasi yang sudah berjalan - seperti sistem pengajuan sertifikasi melalui web sertifikasicdob.pom.go.id yang memudahkan pemantauan setiap tahapan proses, serta penggunaan Zoom untuk pendampingan pelaku usaha yang lebih efisien - telah terbukti meningkatkan kualitas layanan. Di masa yang akan datang, peluang

untuk terus meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi digital masih sangat terbuka.

4. Wilayah kerja menjadi destinasi wisata prioritas

Wilayah kerja Loka Toba yang termasuk destinasi wisata prioritas yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang hasundutan. Dengan ditetapkan wilayah tersebut sebagai destinasi wisata prioritas diharapkan meningkatnya ekonomi melalui masuknya wisatawan lokal maupun mancanegara. Loka POM di Kabupaten Toba menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Loka POM di Kabupaten Toba tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di wilayah kerja tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri khususnya produk UMKM dalam persaingan global.

1.2.4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Loka POM di Kabupaten Toba. Beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Loka POM di Kabupaten Toba:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang diterapkan pada

Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM, khususnya Loka POM di Kabupaten Toba dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui e-commerce. Dengan demikian, Loka POM di Kabupaten Toba dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Kesenjangan dan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan antar daerah

Variasi tingkat dukungan dan peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan menimbulkan risiko perbedaan kualitas pengawasan di setiap wilayah. Kondisi ini dapat mengakibatkan beberapa ancaman, antara lain:

- Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh SKPD terkait, sehingga potensi pelanggaran di lapangan dapat berlanjut tanpa perbaikan yang memadai. Hal ini memperbesar risiko beredarnya produk yang tidak aman, tidak bermutu, atau ilegal.
- Pembinaan pelaku usaha oleh lintas sektor tidak berjalan optimal akibat kurangnya sinergi antar instansi, yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

3. Kualitas Keamanan Pangan dan Pemenuhan Standar Keamanan Pangan bagi UMKM belum Optimal

Data pengawasan Loka POM di Kabupaten Toba terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Produk Pasar menunjukkan bahwa masih terdapat produk yang tidak memenuhi syarat karena:

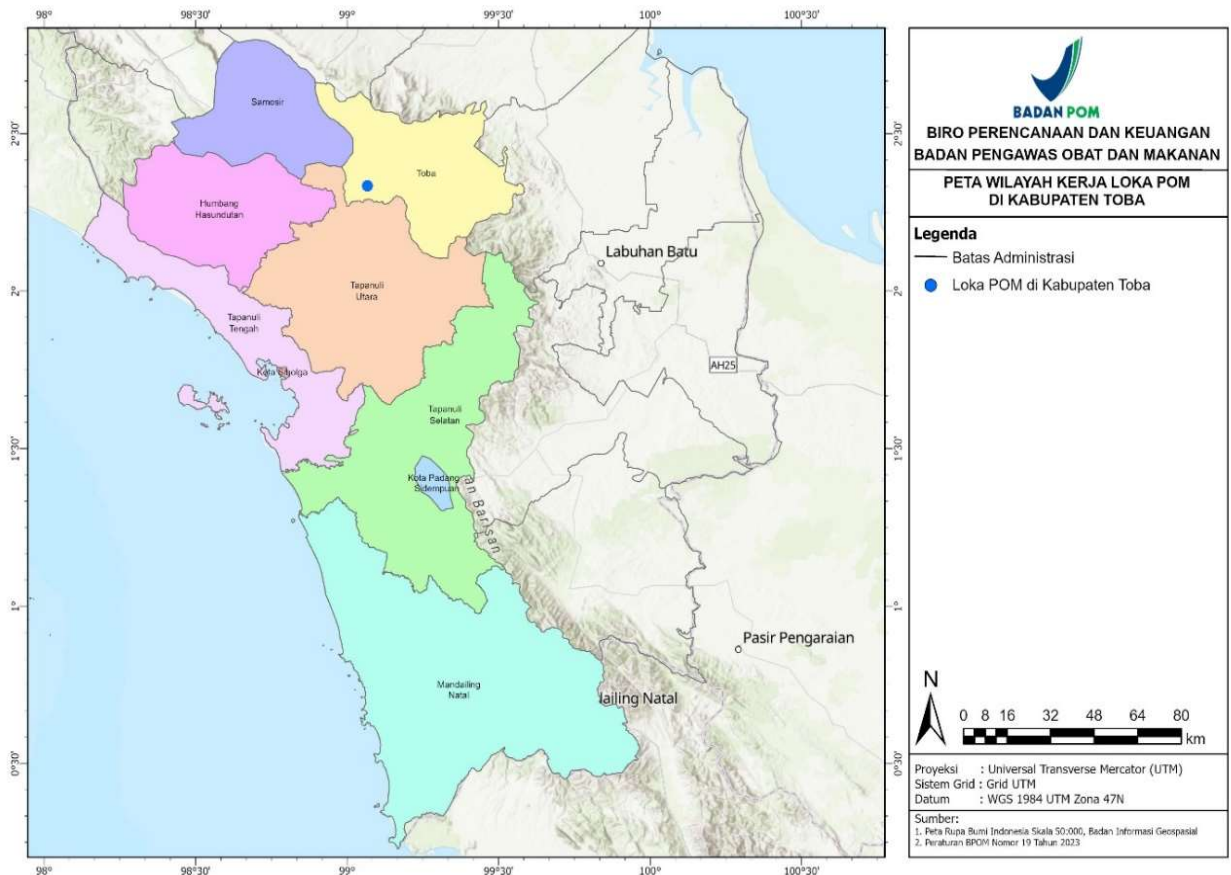
- Hygiene dan sanitasi yang tidak terpenuhi
- Mengandung bahan yang dilarang ditambahkan di pangan, misal: Boraks di lontong dan formalin di produk mie basah

Belum optimalnya kualitas keamanan pangan dan pemenuhan standar keamanan pangan di kalangan UMKM — khususnya industri kecil, mikro, dan PIRT — menjadi ancaman eksternal yang dapat menurunkan efektivitas pengawasan. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan pangan, termasuk masih ditemukannya produk yang tidak memenuhi syarat seperti hygiene dan sanitasi yang buruk, serta penggunaan bahan berbahaya, menunjukkan adanya keterbatasan pengetahuan, perilaku, serta penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di lapangan. Minimnya fasilitas, teknologi, manajemen, dan akses informasi turut memperbesar ketidaksiapan pelaku usaha untuk memenuhi regulasi keamanan pangan, sehingga mendorong meningkatnya potensi pelanggaran. Kondisi ini dapat memperburuk risiko peredaran produk pangan yang tidak aman, melemahkan efektivitas fungsi pengawasan Loka POM di Kabupaten Toba, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

4. Ketidakterpaduan Data Pengawasan yang Menghambat Optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan

Tidak terpadunya data pengawasan Obat dan Makanan antara Loka POM di Kabupaten Toba, SKPD, dan pelaku usaha menimbulkan ancaman serius bagi efektivitas pengawasan. Karena setiap pihak menyimpan data secara terpisah, informasi penting tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini membuat proses pengawasan menjadi lambat, kurang tepat sasaran, dan sulit dikoordinasikan. Akibatnya, potensi pelanggaran lebih mudah terlewat dan upaya pengawasan keseluruhan menjadi kurang efisien.

5. Akses dan Transportasi di Wilayah Kerja



Gambar 36 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Toba

Loka POM di Kabupaten Toba memiliki wilayah kerja sebanyak 9 Kabupaten dimana untuk mencapai wilayah kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten rata-rata memerlukan waktu tempuh sekitar 10 jam perjalanan darat sekali jalan.

Jarak tempuh yang jauh dan kondisi jalan yang buruk menghambat mobilitas petugas dalam melakukan pengawasan serta biaya operasional transportasi yang tinggi dapat membebani anggaran. Kondisi ini merupakan hambatan bagi pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan sehingga tidak dapat menjangkau setiap wilayah kerja secara optimal.

TABEL 4 KETERJANGKAUAN PENGAWASAN

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Toba	jam	5	-	-	Destinasi Pariwisata Prioritas
2	Kabupaten Samosir	jam	7	-	-	Destinasi Pariwisata Prioritas
3	Kabupaten Tapanuli Utara	jam	5	-	-	Destinasi Pariwisata Prioritas
4	Kabupaten Mandailing Natal	jam	10	-	-	-
5	Kabupaten Tapanuli Selatan	jam	8	-	-	-
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	jam	6	-	-	-
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	jam	3	-	-	Destinasi Pariwisata Prioritas
8	Kota Padang Sidempuan	jam	5	-	-	-
9	Kota Sibolga	jam	5	-	-	-
TOTAL		jam				

Hasil analisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi pada unit kerja Loka POM di Kabupaten Toba dirangkum dalam tabel SWOT berikut ini:

TABEL 5 MATRIKS RINGKASAN ANALISIS SWOT

Strength 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kompetensi teknis dan Komposisi SDM Loka POM di Kabupaten Toba 3. Ekosistem Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat	Weakness 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan <i>Gap</i> kompetensi pegawai 2. Infrastruktur kurang memadai 3. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan 4. Terbatasnya dukungan peralatan dan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan
Opportunities 1. Kerja Sama lintas sektor 2. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 3. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis 4. Wilayah kerja menjadi destinasi wisata prioritas	Threats 1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan 2. Kesenjangan dan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan antar daerah 3. Kualitas Keamanan Pangan dan Pemenuhan Standar Keamanan Pangan bagi UMKM belum Optimal 4. Ketidakterpaduan Data Pengawasan yang Menghambat Optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan 5. Akses dan Transportasi di Wilayah Kerja

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden** terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2025-2029 sejalan dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai Badan POM, sebagai berikut:

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.**

Upaya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi fokus utama Loka POM di Kabupaten Toba dalam menjaga keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini juga mencakup penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan di sektor tersebut. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu, responsif, dan terpercaya, sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan secara maksimal.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, percepatan pengembangan dunia usaha di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi salah satu prioritas strategis. Dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi kunci dalam menciptakan struktur ekonomi yang kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global. Melalui berbagai fasilitasi dalam bentuk pendampingan serta akses informasi yang transparan diharapkan UMKM dapat berkembang lebih cepat dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Keberpihakan Loka POM di Kabupaten Toba terhadap UMKM juga mencerminkan komitmen dalam membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis potensi lokal dan inovasi.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian di sektor ini. Melalui pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, masyarakat didorong untuk lebih memahami, terlibat, dan berperan aktif. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan masyarakat mampu membuat pilihan yang tepat, serta turut mendukung pengawasan dan pengembangan industri yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, diharapkan setiap proses mulai dari pengawasan hingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu serta pelayanan yang cepat dan memuaskan.

Loka POM di Kabupaten Toba sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan Loka POM di Kabupaten Toba ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Toba sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

TABEL 6 INDIKATOR TUJUAN BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang aman dan bermutu	74.75	75.9	77.25	78.95	80.2
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Toba, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Toba akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Loka POM di Kabupaten Toba berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- b. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- k. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- l. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- m. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- n. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- o. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Loka POM di Kabupaten Toba berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektifitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam penentuan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline. Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, UPT BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

7. Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi :

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

TABEL 7 PENJABARAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN KEGIATAN

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 15. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 8 INDIKASI RISIKO SASARAN KEGIATAN LOKA POM DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a. Melakukan pemetaan kebutuhan peralatan laboratorium secara berkala untuk memastikan kecukupan dan prioritas pengadaan b. Mengoptimalkan pemeliharaan rutin (preventive maintenance) dan kalibrasi peralatan agar umur pakai lebih panjang c. Mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan dan perbaikan peralatan melalui perencanaan anggaran tahunan	Tim Pengujian
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	a. Melaksanakan intensifikasi sampling dan pemeriksaan produk OBA dan kosmetik di wilayah kerja UPT berdasarkan hasil pemetaan risiko dan prioritas b. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait bahaya bahan kimia obat pada produk	Tim KIE, Tim Pengujian, Tim Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			OBA dan kosmetik melalui media sosial, penyuluhan, dan pameran. c. Kolaborasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan instansi terkait) untuk menindaklanjuti temuan produk ilegal atau mengandung bahan berbahaya.	
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	Tim Sertifikasi, Tim Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan b. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Tim Penindakan, Tim Pemeriksaan, Tim Sertifikasi
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan fortifikasi pangan	a. Melakukan pembinaan dan monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha.	Tim Infokom, Tim Sertifikasi
3	Meningkatnya efektifitas KIE	Jangkauan pelaksanaan KIE belum merata di wilayah kerja	a. Menyusun peta wilayah prioritas KIE. b. Melaksanakan KIE mobile ke daerah terpencil melalui kerja sama lintas sektor.	Tim Infokom
		Minimnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan KIE.	a. Meningkatkan promosi kegiatan melalui media sosial dan kanal informasi lokal. b. Melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan KIE.	Tim Infokom
		Kurangnya kolaborasi dengan mitra strategis (media, dinas terkait, komunitas).	a. Membangun jejaring kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, media massa, dan komunitas. b. Melakukan kegiatan KIE bersama lintas instansi untuk memperluas dampak.	Tim Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Keterbatasan SDM dan kompetensi petugas KIE dalam mengelola kegiatan komunikasi publik.	a. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik, media sosial, dan teknik presentasi. b. Optimalisasi pembagian tugas KIE antar pegawai sesuai kompetensi.	Tim Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam penentuan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. b. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan c. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB. d. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).	Tim Sertifikasi, Tim Infokom
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. b. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri	Tim Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			c. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti	a. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. b. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Tim Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik	a. Melakukan inventarisasi kebutuhan fasilitas layanan publik. b. Mengusulkan pengadaan sarana melalui DIPA atau kerja sama instansi. c. Mengoptimalkan sarana yang ada secara efisien.	Tata Usaha, Tim Sertifikasi, Tim Infokom, Tim Pengujian
		Prosedur Pelayanan yang belum dipahami oleh masyarakat	a. Menyediakan media informasi yang jelas (banner, brosur, website, media sosial). b. Melakukan sosialisasi standar pelayanan publik ke pelaku usaha dan masyarakat.	Tim Infokom, Tim PPID
		Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat	a. Melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala.	Tim Infokom, Tim PPID

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		terhadap pelayanan publik	b. Menindaklanjuti hasil SKM dengan rencana perbaikan layanan. c. Membuka kanal pengaduan (online/offline) yang mudah diakses.	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja.	Tata Usaha
		Ketidaksesuaian pelaporan kinerja, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku	a. Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan internal	Tata Usaha
		lemahnya efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian aset	b. optimalisasi manajemen risiko dan pengelolaan aset	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM

meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM. BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Toba mendukung seluruh arah kebijakan BPOM.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif dan inklusi sosial.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Toba

Loka POM di Kabupaten Toba mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Toba melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Toba melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kabupaten Toba mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah mobil laboratorium pengujian keliling dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengujian cepat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba.
- c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Toba, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Toba harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Toba juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Toba terus mempersiapkan data dan dokumen pendukung dalam rangka pengalokasian anggaran untuk pembangunan fasilitas gedung kantor dan laboratorium pengujian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c) Loka POM di Kabupaten Toba mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan (termasuk MBG).

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE) yang dilakukan secara komprehensif. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- b) Pengujian obat dan makanan menggunakan Rapid Test (screening) ;
- c) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Toba perlu selalu dilakukan optimalisasi untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan, hal ini ditujukan agar Loka POM di Kabupaten Toba dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya.

5. Penguatan kemitraan dan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Toba dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b) Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c) Tindakan lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada

penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Toba harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan Sistem Data, Teknologi Informasi, dan Analisis Kebijakan dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Toba harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a) Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh Loka POM di Kabupaten Toba memiliki kualitas yang baik.
- c) Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, Loka POM di Kabupaten Toba masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum up to date. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Toba sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Toba secara keseluruhan (continuous improvement).
- b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029, strategi yang dihasilkan melalui Analisis SWOT di atas akan dikaitkan lebih lanjut dengan arah kebijakan BPOM dengan tabel berikut.

TABEL 9 PEMETAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN TOBA 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN TOBA
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan (termasuk MBG).
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan	Penguatan Sistem Data, Teknologi Informasi, dan Analisis Kebijakan dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN TOBA
percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Toba juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

a. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.

Untuk mendukung Arah kebijakan dan Strategi diatas, Loka POM di Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.”Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Toba tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Toba.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. BPOM menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut untuk unit kerja Loka POM di Kabupaten Toba:

TABEL 10 TARGET KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TOBA 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	SK1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.25	83.5	84.75	86.00	87.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27.00	28.00	29.00	30.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
		Persentase keputusan/rekomendasi	78.90	79.00	79.10	79.25	79.50

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.25	98.00	98.75	99.25	99.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.60	93.40	94.20	95.00	95.80
		Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
		Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi dalam Pencapaian	11.11	22.22	33.33	44.44	55.56

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Kabupaten / Kota Pangan Aman					
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.75	16.00	18.5	21	23
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81.00	82.00	83.00	84.00
2	SK2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	SK3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.24	88.11	88.98	89.85	90.73
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
		Jumlah desa pangan aman	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	SK4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.00	28.00	48.00	72.00	100
5	SK5. Terlaksananya	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	75.00	77.00	79.00	80.00	81.00

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					
6	SK6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejaatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
7	SK7. Layanan Pubik UPT yang prima	Indeks Palayanan Publik UPT	3.75	3.85	3.90	3.95	4.00
8	SK8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.44	75.94	76.44	76.94	77.44
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.40	2.60	2.80	2.90	3.00
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Toba periode 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 11 KERANGKA PENDANAAN PERIODE 2025-2029 BERDASARKAN KEGIATAN

Kegiatan	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.415,39	1.556,93	1.712,62	1.883,88	6.224,77
Dukungan Manajemen	2.153,82	2.369,21	2.606,13	2.866,74	3.153,42
TOTAL	3.569,21	3.926,14	4.318,75	4.750,62	9.378,19

TABEL 12 KERANGKA PENDANAAN PERIODE 2025-2029 BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN

Sumber Dana	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.569,21	3.926,14	4.318,75	4.750,62	9.378,19
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.569,21	3.926,14	4.318,75	4.750,62	Rp9.378,19

Pelaksanaan seluruh kegiatan Loka POM di Kabupaten Toba diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi BPOM secara nasional.

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Toba 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Loka POM di Kabupaten Toba 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Loka POM di Kabupaten Toba baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Loka POM di Kabupaten Toba oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Toba secara berkala.

Renstra Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Toba sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kabupaten Toba								3.569,21	3.926,14	4.318,75	4.750,62	9.378,19	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.415,39	1.556,93	1.712.62	1.883,88	6.224,77	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	82.25	83.50	84.75	86.00	87.25					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM di Kabupaten Toba	0	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	85	86	87	88	89					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Toba	100	100	100	100	100					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	85	87	89	92	95					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM di Kabupaten Toba	78.9	79	79.1	79.25	79.5					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	100	100	100	100	100					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	90	91	92	93	94					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	97.25	98	98.75	99.25	99.75					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	90	91	92	93	94					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	92.60	93.40	94.20	95	95.80					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Toba	80	81	82	83	84					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM di Kabupaten Toba	100	100	100	100	100					
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Toba	11.75	16	18.5	21	23					
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM di Kabupaten Toba	11.11	22.22	33.33	44.44	55.56					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	0	81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Loka POM di Kabupaten Toba	0	45	45	45	45					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	195	150	150	150	150					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	490	494	520	546	575					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	13	13	14	16	17					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	91	109	119	127	139					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Loka POM di Kabupaten Toba	84	84	84	84	84					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Loka POM di Kabupaten Toba	0	0	1	1	1					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Loka POM di Kabupaten Toba	0	600	600	600	600					
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Loka POM di Kabupaten Toba										
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Toba	100	100	100	100	100					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	1					
	Meningkatnya efektivitas KIE		Loka POM di Kabupaten Toba										
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM di Kabupaten Toba	87.24	88.11	88.98	89.85	90.73					

[illegible]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM di Kabupaten Toba	12	28	48	72	100					
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	3	4	5	6	7					
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Loka POM di Kabupaten Toba										
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM di Kabupaten Toba	75	77	79	80	81					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	2					
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Loka POM di Kabupaten Toba										
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Toba	90	91	92	93	94					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	14	14	15	15	15					
	Layanan Publik UPT yang prima		Loka POM di Kabupaten Toba										
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM di Kabupaten Toba	3.75	3.85	3.9	3.95	4					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Toba	6	17	17	20	19					
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Loka POM di Kabupaten Toba										
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Toba	75.44	75.94	76.44	76.94	77.44					
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Toba	5	5	5	5	5					
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Toba	2.4	2.6	2.8	2.9	3					
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM di Kabupaten Toba	100	100	100	100	100					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi				
								(Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Loka POM di Kabupaten Toba	3	10	6	6	6					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.153,82	2.369,21	2.606,13	2.866,74	3.153,42
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Toba	1	1	1	1	1					